



MASTERPLAN SMART REGENCY KUTAI KARTANEGARA

-  SMART GOVERNANCE
-  SMART SOCIETY
-  SMART LIVING
-  SMART ECONOMY
-  SMART BRANDING
-  SMART ENVIRONMENT



DISKOMINFO
2017

MASTERPLAN

SMART REGENCY



DAFTAR ISI

ANALISIS STRATEGIS SMART REGENCY	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
I. Pendahuluan.....	9
II. Analisa Masa Depan	10
III. Analisis Kesiapan Daerah.....	12
IV. Analisis Gap	22
V. Analisis Visi Pembangunan Smart City.....	25
MASTERPLAN SMART REGENCY.....	31
Kata Sambutan Kepala Daerah	32
Kata Sambutan Sekretaris Dewan Smart Regency	33
1. Pendahuluan	34
2. Visi Kutai Kartanegara Smart Regency.....	37
3. Strategi Pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency	38
4. Rencana Aksi Kutai Kartanegara Smart Regency	43
5. Roadmap Pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency	50
6. Penutup	52
Executive Summary Master Plan SMART REGENCY	55
1. Latar Belakang	56
2. Visi Smart Regency Kutai Kartanegara	57
3. Strategi Pembangunan Smart City.....	58
4. Roadmap Kutai Kartanegara	63
Referensi.....	66
Lampiran.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga (ADH)	10
Gambar 2.2. Grafik Rasio Gini Kabupaten Kutai Kartanegara.	11
Gambar 3.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara 2016	12
Gambar 3.2. Banyaknya PNS di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 2016.....	14
Gambar 3.3. Topologi Fiber Optic Kabupaten Kutai Kartanegara	16
Gambar 3.4. Topologi NOC-DC di Diskominfo Kukar	17
Gambar 3.5. Peta kualitas dan cakupan layanan Seluler di Kab.Kukar	17
Gambar 3.6. Statistik Kondisi Pendidikan di Kutai Kartanegara.	18
Gambar 1.1. Elemen Smart City Readiness (Sumber : Citiasia Inc)	36
Gambar 1.2. Dimensi Smart City	36
Gambar 4.1. Arsitektur Integrasi Sistem Informasi dengan Government Service Bus (GSB).....	47



KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Sebaran Penduduk pada Jenjang Pendidikan.....	13
Tabel 3.2. Sebaran Penduduk berdasarkan kepemilikan Ijazah/STTB.....	13
Tabel 3.3. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah	14
Tabel 3.4. Analisis Kapasitas Keuangan daerah	15
Tabel 3.5 Skor Total Per Dimensi PeGI PEMERINTAH Kabupaten Kutai Kartanegara 2016	19
Tabel 3.6. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	19
Tabel 3.7. Analisis kesiapan kelembagaan daerah.....	20
Tabel 5.2. Sasaran Makro dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	26
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kutai Kartanegara 2016-2021	26
Tabel 5.3. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kab. Kukar 2016- 2021	27
Tabel 5.4. Arah Kebijakan Kewilayahan: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	28
Tabel 5.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Misi Kelima	28
Tabel 2.1. Tabel Indikator Sasaran RPJMD dan Dimensi Smart City/Regency.....	37
Tabel 3.1. Strategi dan Indikator Capaian Smart Governance	38
Tabel 3.2. Strategi dan Indikator Capaian Smart Branding	39
Tabel 3.3. Strategi dan Indikator Capaian Smart Economy.....	40
Tabel 3.4. Strategi dan Indikator Capaian Smart Living	41
Tabel 3.5. Strategi dan Indikator Capaian Smart Society.....	41
Tabel 3.6. Strategi dan Indikator Capaian Smart Environment.....	42
Tabel 4.2. Daftar Lembaga/Organisasi Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency	43
Tabel 4.1. Daftar Kebijakan Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency	43
Tabel 4.3. Perbandingan Teknologi Infrastruktur TI.....	45
Tabel 4.4. Model Pengembangan Disaster Recovery System/Center	46
Tabel 4.5. Kegiatan Peningkatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency	49
Tabel 5.2. Roadmap Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kutai Kartanegara Smart Regency	50
Tabel 5.1. Roadmap Implementasi Quick Win.....	50
Tabel 5.3. Roadmap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency.....	51
Tabel 5.4. Roadmap Penguatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency	51
Tabel 3.1. Strategi dan Indikator Capaian Smart Governance	58
Tabel 3.2. Strategi dan Indikator Capaian Smart Branding	59
Tabel 3.3. Strategi dan Indikator Capaian Smart Economy.....	60
Tabel 3.4. Strategi dan Indikator Capaian Smart Living	61
Tabel 3.5. Strategi dan Indikator Capaian Smart Society.....	61
Tabel 3.6. Strategi dan Indikator Capaian Smart Environment.....	62
Tabel 4.2. Roadmap Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kutai Kartanegara Smart Regency	63
Tabel 4.1. Roadmap Implementasi Quick Win.....	63
Tabel 4.3. Roadmap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency.....	64
Tabel 4.4. Roadmap Penguatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency	64



BUKU 1

ANALISIS STRATEGIS

SMART REGENCY



Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih sebagai salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan program Gerakan Menuju 100 Smart City bersama 24 Kota/KabupatenlainnyadiIndonesia.DalamRPJMD2016-2021,pemerintahbersamaDPRDtelah merencanakan pembangunan Smart City yang kemudian disepakati dengan istilah Smart Regency Kutai Kartanegara. Terkait hal ini, Bupati telah menetapkan Dewan dan Tim Pelaksana Smart Regency untuk menyusun dan melaksanakan Master Plan Smart Regency Kutai Kartanegara serta menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leader dalam program kerja sesuai dengan amanah RPJMD. Melalui proses analisa masa depan, kesiapan daerah, analisis gap dan visi-misi dalam berbagai dokumen referensi, serta kondisi terkini dari Kabupaten Kutai Kartanegara, maka di tetapkan Visi Pembangunan Smart Regency Kutai Kartanegara adalah :

**“Mewujudkan akselerasi kemajuan Kutai Kartanegara
Melalui Inovasi yang Berbasis Kearifan Lokal.”**

I. Pendahuluan



Gagasan Gerakan Menuju 100 smart city muncul dari berbagai kalangan, yaitu dari pemerintahan (Departemen Dalam Negeri; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kantor Staf Kepresidenan), beberapa tim ahli dari akademisi dan praktisi (UI; ITB; UMN; Perbanas; Citiasia; dan institusi lainnya) dan perwakilan dari beberapa perusahaan (seperti Siemens; Indosat Ooredoo Business; Lintasarta; dan Kompas Gramedia). Gerakan ini resmi diluncurkan pada acara Indonesia Smart City Summit 2017 di Makassar pada 22-23 Mei 2017 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah dengan 25 Kepala Daerah yang daerahnya telah terpilih untuk menjadi Pilot Project Smart City di tahun 2017 ini.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 1 dari 25 daerah yang telah lolos seleksi dan terpilih untuk melaksanakan program kerja dari Gerakan 100 Smart City (Surat Pemberitahuan Nomor 26.KOMINFO/DJAI/AI.01,05/05/2017). Kabupaten Kutai Kartanegara (Kab. Kukar) dapat memenuhi beberapa hal yang dijadikan parameter penilaian dalam proses assessment Smart City, yaitu visi, regulasi, SDM, serta potensi daerah. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong Kabupaten dengan luasan terbesar ke-2 di Kalimantan Timur dalam memenuhi parameter Smart City, antara lain: tempat sejarah awal pola pemerintahan (kerajaan) di Indonesia; merupakan Kabupaten di Kaltim dengan PDRB tertinggi; memiliki tujuan wisata yang relatif lengkap; memiliki sumber daya alam yang beragam; terletak di daerah aliran sungai Mahakam dan Delta Mahakam yang merupakan jalur transportasi dan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur.

II. Analisa Masa Depan



Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2016-2021 menetapkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27% pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 1,5% dari tahun 2016 dan terkoreksi 1,6% pada tahun 2021 dari prediksi dalam RPJPD 2005-2025. Sedangkan laju inflasi tahun 2021 diharapkan dapat ditekan pada 6,94%. Untuk mencapai hal tersebut beberapa program kerja dan tujuan pembangunan perekonomian di arahkan pada :

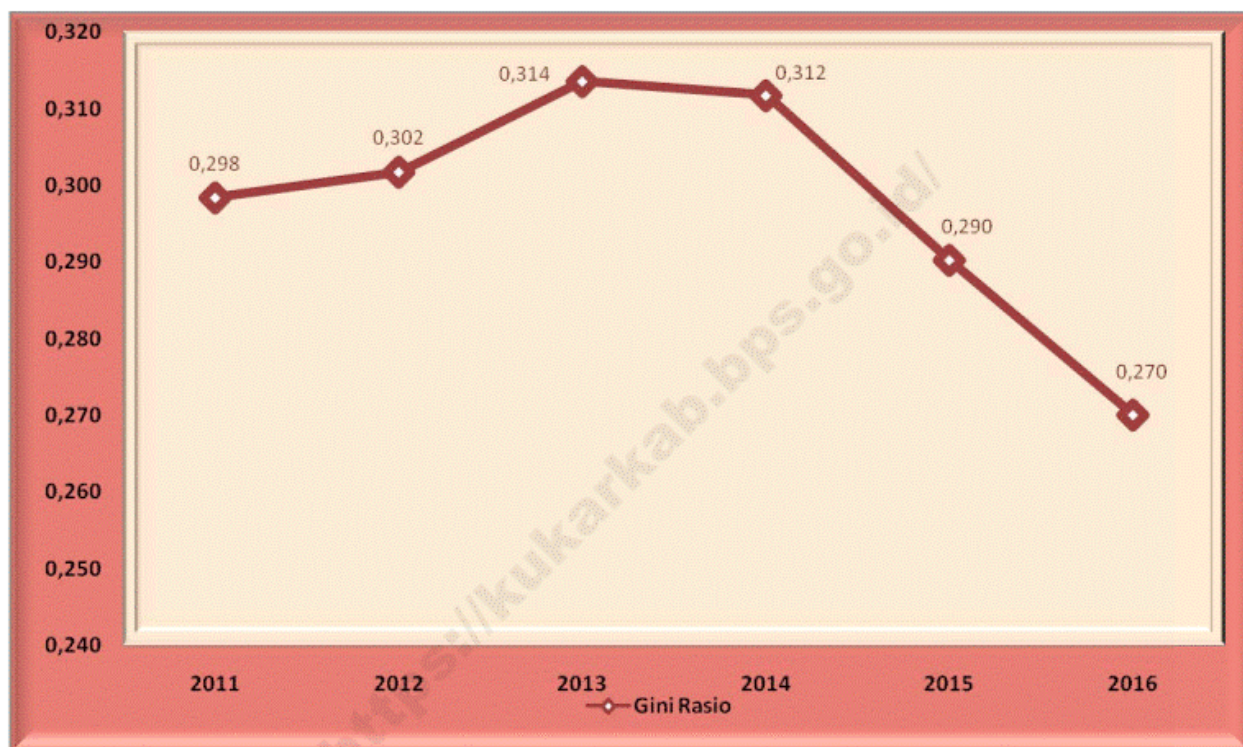
1. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah.
2. Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur.
4. Mewujudkan ekonomi pedesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development)
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

PDB harga konstan tanpa migas dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat dalam grafik pada gambar 2.1, hal ini mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun di Kab. Kukar membaik dan bisa dikatakan mulai terlepas pandangan bahwa daerah ini hanya bergantung pada sektor migas dan tambang. PRDB non migas di Kab.Kukar didominasi oleh peningkatan di sektor pertanian sebesar 15,9%, bangunan 11,95% dan perdagangan, hotel, serta restoran sebesar 5,24%.



Gambar 2.1. Grafik PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan Konstan (dalam Triliyun Rupiah) 2010-2015 (Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016)

Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 dalam RPJMD Kab.Kukar diprediksi pada angka 77,21% atau meningkat sekitar 5,43% dari capaian IPM di tahun 2015. Untuk mendukung peningkatan angka IPM tersebut, Pemkab Kukar bertujuan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia melalui beberapa sasaran seperti : Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan; Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial; Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2014 - 2016

Gambar 2.2. Grafik Rasio Gini Kabupaten Kutai Kartanegara.
(Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2016)

Tingkat kesenjangan pendapatan di Kab.Kukar menurut data BPS dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional 2014-2016 mengalami penurunan drastis (lihat gambar 2.2), dari 0,298 ke angka 0,27. Sehingga target RPJMD yang dipatok pada angka 0,27 pada tahun 2021 telah tercapai di tahun 2016. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan akan di turunkan dari 7,56% (data tahun 2015) menjadi 4,23% dari total keseluruhan penduduk Kab. Kukar di tahun 2021.

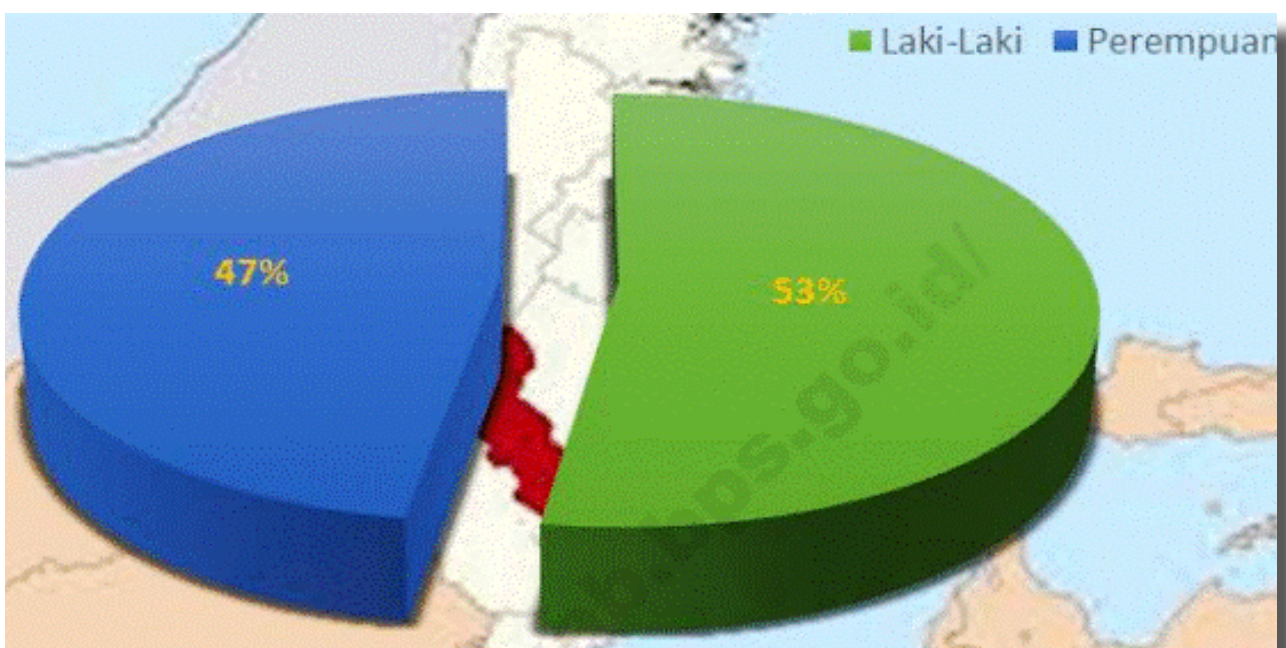
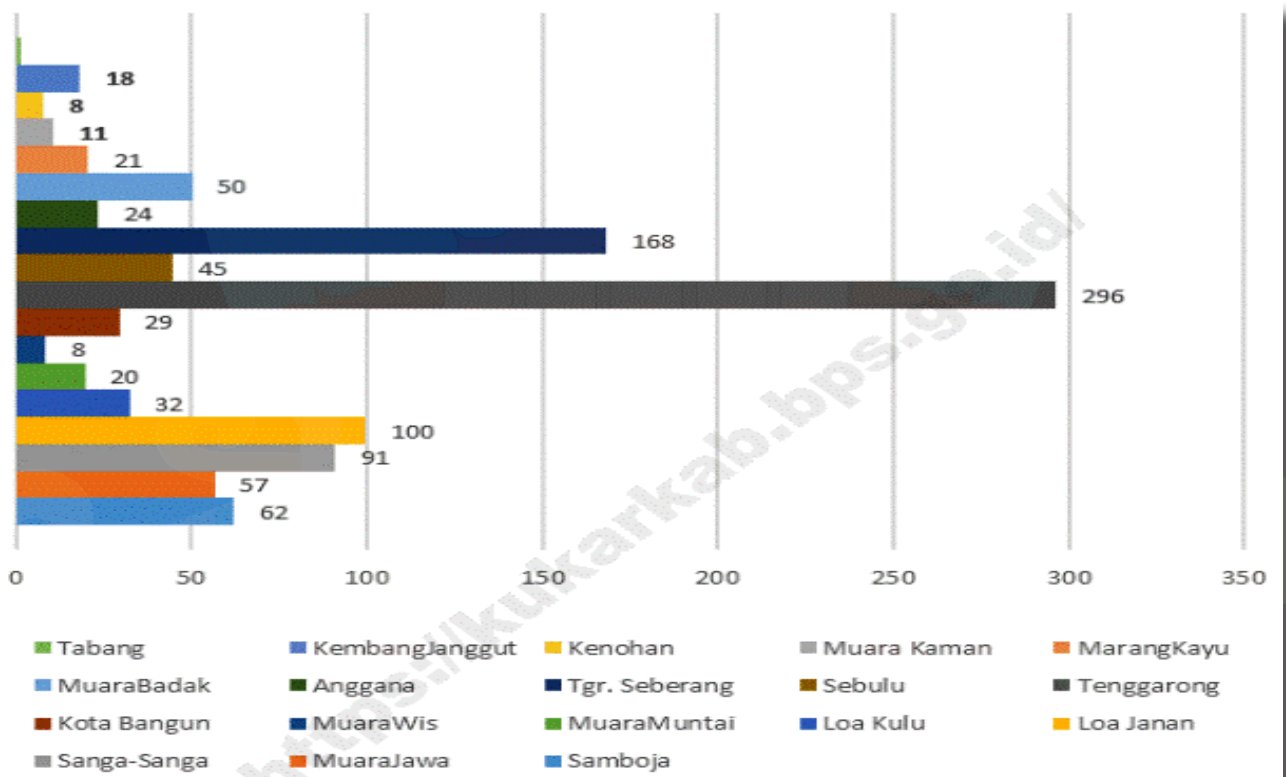
III. Analisis Kesiapan Daerah



3.1. Struktur

3.1.1. Kesiapan SDM

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2016 adalah 735.016 Jiwa yang terdiri atas 385.994 laki-laki dan 349.022 perempuan. Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 2,4% pada tahun 2016 dan sebagian besar penduduk berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (16,3%), dimana hal ini masih jauh dari proyeksi penduduk pada saat 100 kemerdekaan RI, dimana sekitar 75-80% berada di perkotaan.



Gambar 3.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 (Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017)

Dari keseluruhan penduduk di Kab. Kukar di tahun 2016, sekitar 99,4% penduduk berumur 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan baca & tulis huruf latin, 28,93% diatas umur 5 tahun berstatus bersekolah dengan sebaran sesuai dengan tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sebaran Penduduk pada Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang Diduduki	2015			2016		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD sederajat	16,96	16,42	16,71	15,27	16,17	15,70
SMP sederajat	6,07	6,68	6,35	4,96	6,60	5,73
SMA sederajat	3,89	4,13	4,00	6,09	4,69	5,43
Perguruan Tinggi	1,26	2,00	1,61	1,84	2,06	1,95

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2016

Tabel 3.2. Sebaran Penduduk berdasarkan kepemilikan Ijazah/STTB

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	2015			2016		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak punya ijazah SD	9,17	13,89	11,36	10,09	15,52	12,62
SD sederajat	28,40	32,30	30,21	27,67	33,68	30,47
SMP sederajat	23,40	22,03	22,76	22,58	20,99	21,84
SMA sederajat	24,62	18,71	21,88	28,37	20,41	24,67
SMK/MAK	7,79	5,17	6,58	5,38	1,96	3,79
Diploma I/II	0,57	0,69	0,63	0,06	0,79	0,40
Diploma III	0,93	1,27	1,09	0,87	0,91	0,89
Diploma IV/S1	4,47	5,81	5,09	4,52	5,60	5,02
S2 dan S3	0,65	0,12	0,41	0,46	0,13	0,31

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2016

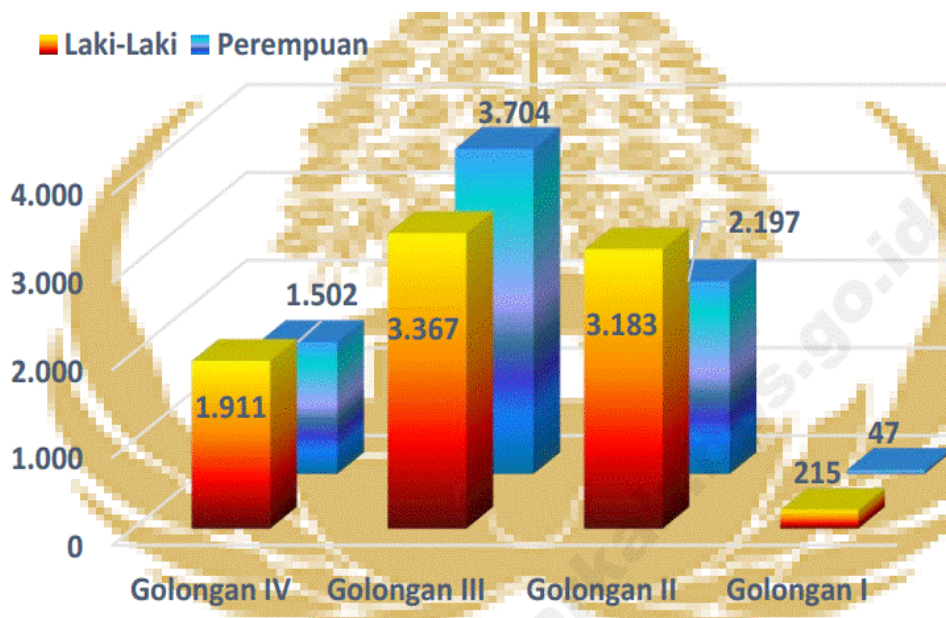
Penduduk Kab.Kukar memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam berdasarkan kepemilikan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dalam tabel 3.2, mulai dari SD sampai dengan berpendidikan Pasca Sarjana (S2 & S3). Jumlah kepemilikan ijazah dari tahun 2015 ke 2016 cenderung meningkat untuk jenis kelamin perempuan, hal ini menunjukkan hak pendidikan atas wanita terpenuhi dengan baik di Kab. Kukar.

Tenaga pengajar di Kutai Kartanegara untuk semua jenjang pendidikan sudah memadai walaupun pada tingkat SD mencatat beban guru relatif lebih berat dibanding jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rasio murid guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di bawah Diknas dalam periode 2015/2016 berkisar antara 10-17, artinya seorang guru dalam mengajar harus menghadapi sekitar 10-17 orang murid. Sedangkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru SLTP adalah 2-39 murid, dan beban yang harus dihadapi guru SMU adalah 7-44 murid. Pada jenjang Perguruan Tinggi, terdapat 5 PTN/PTS di Kab.Kukar mulai dari setingkat Akademi sampai dengan Universitas.

Pembangunan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas yang terjadi di Kab. Kukar tahun 2016 sebanyak 763 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat 1054 kasus. Upaya Pemkab Kukar dalam memelihara kesehatan Sumber Daya Manusia di Kab.Kukar tercermin dengan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit yang berjumlah 3 RSUD, 32 Puskesmas dan 174 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan. Tersedia 69 dokter umum dan 43 dokter gigi yang melayani masalah kesehatan penduduk di puskesmas-puskesmas tersebut.

3.1.2. Kemampuan Birokrasi

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang di pimpin oleh Bupati Rita Widyasari, Ph.D pada tahun 2016 di dukung dengan 16.126 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.799 orang tenaga honorer yang bekerja pada 22 Dinas, 7 Badan dan Dua sekretariat, Tiga RSUD, Inspektorat serta Kesbangpol dengan jumlah 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki kesempatan yang sama dengan pria, hal ini terlihat pada gambar 3.2 dimana gap antar gender tidak terlalu signifikan, kecuali untuk golongan 1.



Gambar 3.2. Banyaknya PNS di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 2016 (Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017)

Dalam tabel 3.3 digambarkan persentase jenjang pendidikan PNS di Pemkab Kukar, porsi pelaksana tugas atau kegiatan teknis yang umumnya ada pada jenjang D3 (ke bawah) tersedia dalam jumlah yang cukup banyak jika di bandingkan di level perencana program kerja (jenjang pasca sarjana) atau supervisor (jenjang S1/D4). Berdasarkan umur persentase terbesar SDM PNS berada pada usia yang relatif produktif, yaitu pada rentang umur 31-50 tahun sebesar 74, 55% dari total PNS Pemkab Kukar.

Tabel 3.3. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Nilai/Kondisi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan pasca sarjana (S2/S3)	3,46%	Baik		
2.	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S1/D4	39,85%	Baik		
3.	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan D3 ke bawah	56,69%	Baik		
4.	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	23,99%	Baik		
5.	Persentase pegawai berusia 41 - 50 tahun terhadap jumlah pegawai	41,21%	Baik		
6.	Persentase pegawai berusia 31 - 40 tahun terhadap jumlah pegawai	33,34%	Baik		
7.	Persentase pegawai berusia sama dengan atau kurang dari 30 tahun terhadap jumlah pegawai	1,46%	Baik		

Pemerintah dan Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat memiliki banyak prestasi dalam berbagai bidang, antara lain :

- Kepala Daerah Terbaik atau Best Achiever in Government di Obsession Awards 2017 dan Women's Obsession Awards 2017.
- Kepala Daerah yang memperoleh Woman Icon of The Year dalam ajang Global Leadership Award 2016.
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 2016, 2015, 2014 dan 2013.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar 2016 berada di peringkat ke-10 se-Indonesia.
- Evaluasi LAKIP tahun 2016 yang diraih Pemkab Kukar masuk dalam klasifikasi nilai B, dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kaltim.
- Festival Erau yang menjadi sebagai juara I untuk kategori Festival Budaya Terpopuler 2016 (Most Popular Cultural Festival) di Tanah Air.
- Pemkab Kukar tahun 2016 mendapatkan Penghargaan Regional Marketeers Award (RMA) 2016.
- Indonesia's Attractiveness Award 2016 dari Kementerian Kominfo.
- Anugerah kabupaten terbaik per koridor MP3EI (Kalimantan) dari Kemenpan RB 2016.
- Penghargaan Dwija Praja Nugraha Nugraha 2016 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diberikan sebagai penghormatan atas perhatian dan komitmen Bupati terhadap guru dan pendidikan di Kukar.
- Penghargaan Kawastara Pawitra 2016 datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai salah satu kepala daerah yang berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan Permendiknas No.28/2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah utamanya penyiapan calon kepala sekolah.
- Penghargaan Parahita Ekapraya (APE) 2016 Tingkat Utama sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.3. Kemampuan Anggaran

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kutai Kartanegara menurut data BAPPEDA Kukar mencapai Rp. 267.214.032.301,- yang mengalami peningkatan sekitar 26,10 % dari tahun 2015. PAD terbesar datang dari Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah sebesar 65,6% dari total keseluruhan pendapatan, dimana Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD menyumbang sebesar Rp. 112.271.917.093. Pada tahun 2016, PMDN yang terjadi di Kab Kukar mengalami peningkatan menjadi 37 proyek dari 31 proyek pada tahun sebelumnya dengan jumlah modal yang ditanamkan sebesar 973 Milyar Rupiah. Sedangkan PMA juga meningkat menjadi 56 proyek di tahun 2016 dari 24 proyek pada tahun 2015 dengan jumlah modal yang ditanamkan sebesar Rp. 2.272.030.595.825

Tabel 3.4. Analisis Kapasitas Keuangan daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	6,47%			
2.	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIL-PA) tahun lalu	385M			
3.	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja daerah	46,93%			
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja daerah	15,15%			
5.	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD tahun 2017	-			
6.	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD tahun 2018	-			
7.	Jumlah program pembangunan untuk mendukung Smart City di daerah	-			
8.	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah (Luar Negeri/PMA)	Rp. 2.272.030.595.825			
9.	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah (Dalam Negeri/PMDN)	Rp. 973.606.015.564			
10.	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung Smart City	-			

3.2. Infrastruktur

3.2.1. Fisik

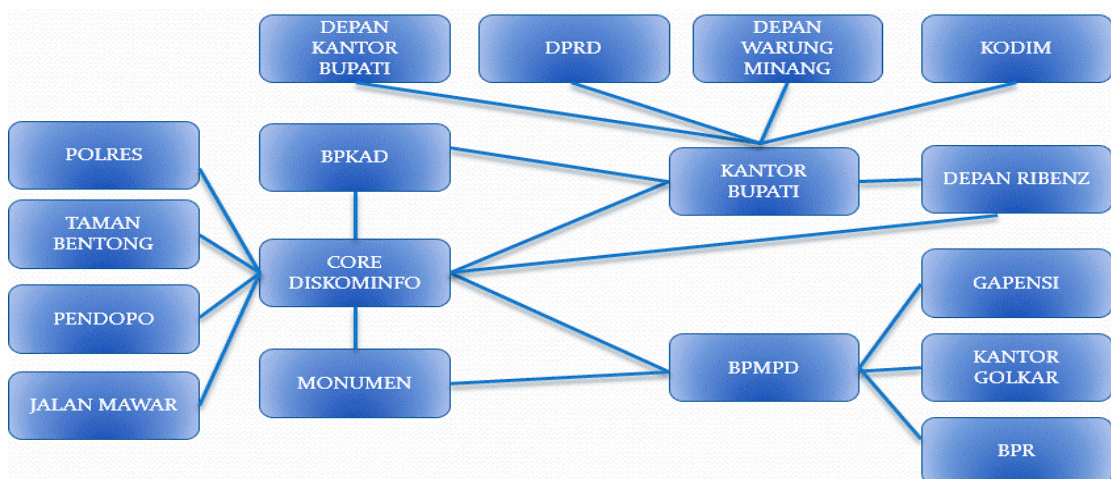
Ketersediaan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, pembangkit energi/listrik, pengolahan air minum dan pengolahan limbah merupakan faktor penentu dalam kemajuan ekonomi suatu wilayah. Data statistik Kab. Kukar 2016 masih menunjukkan terdapat beberapa kecamatan yang masih belum memiliki jalan yang di aspal serta tidak ada perencanaan penambahan jalan.

Air minum merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki. Keadaan prasarana air bersih tampaknya semakin dibutuhkan masyarakat terutama di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber air di daerah perkotaan sudah banyak yang tercemar, baik oleh limbah industri maupun rumah tangga. Produksi air minum Kab.Kukar pada tahun 2015 sebanyak 31.645.675 m3 dimana 20.779.959 m3 bahan baku air minum berasal dari sungai dan anak sungai Mahakam.

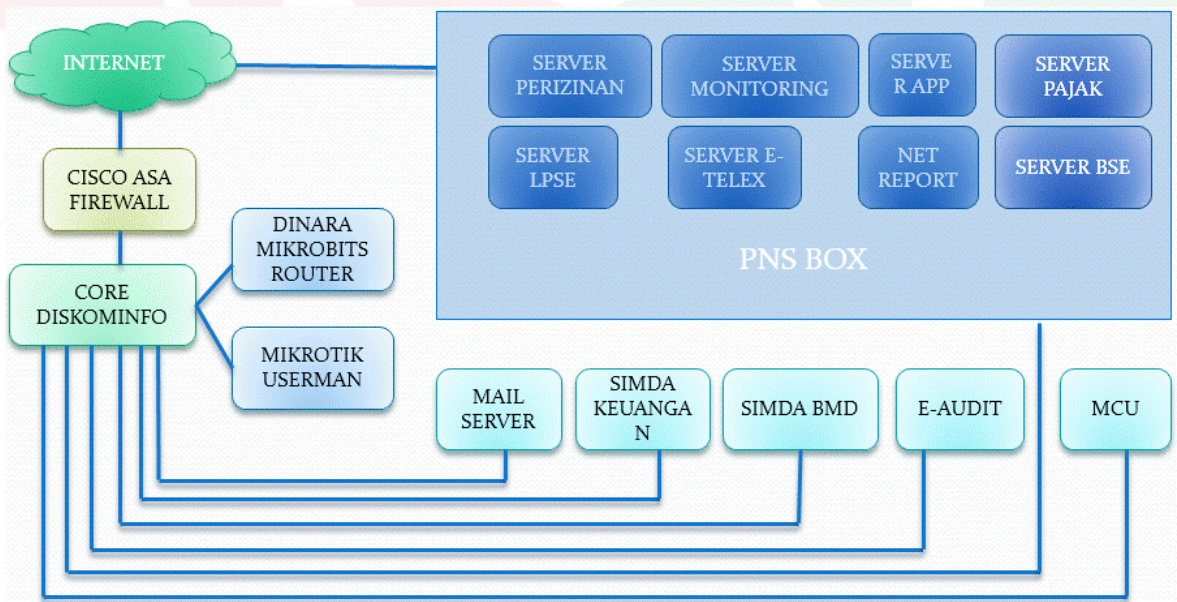
3.2.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 terdapat sekitar 95,02 % Penduduk Kab.Kukar berumur 5 tahun ke atas mengakses internet dengan menggunakan handphone/smartphone dan 95,37% akses dilakukan dari rumah. Dari data ini dapat di simpulkan bahwa infrastruktur seluler menjadi tumpuan utama untuk memperoleh atau bertukar informasi dari internet. Mayoritas pengguna internet di Kukar mengakses layanan Sosial Media, Berita dan Hiburan, sebagian kecil menggunakan internet untuk mengakses layanan email, mengerjakan tugas sekolah, jual/beli dan layanan lainnya. Jumlah pemilik komputer di rumah sebanyak 22,68% dari total penduduk Kukar dan dari angka kepemilikan tersebut hanya 16,34% penduduk yang menggunakan komputernya, sehingga terdapat 6,34% komputer yang tidak dipergunakan.

Pemerintah Kab.Kukar menunjang kegiatan operasional TIK di Pemerintahan dengan Jaringan Komputer Lokal menggunakan berbagai media transmisi seperti Fiber Optic, Wireless LAN dan Wire LAN. Selain itu tersedia kawasan-kawasan tertentu yang di cover oleh layanan free hotspot oleh Diskominfo Kukar. Untuk mengcover wilayah yang cukup luas dan kontur bumi yang berbukit, Pemkab Kukar memiliki 22 Tower yang saling terkoneksi dan di monitoring dari Network Operation Center/NOC dan Data Center/DC di Kantor Diskominfo Kukar. Di ruangan NOC/DC terdapat berbagai Peralatan Jaringan Komputer dan Server untuk berbagai aplikasi layanan (internal/eksternal).



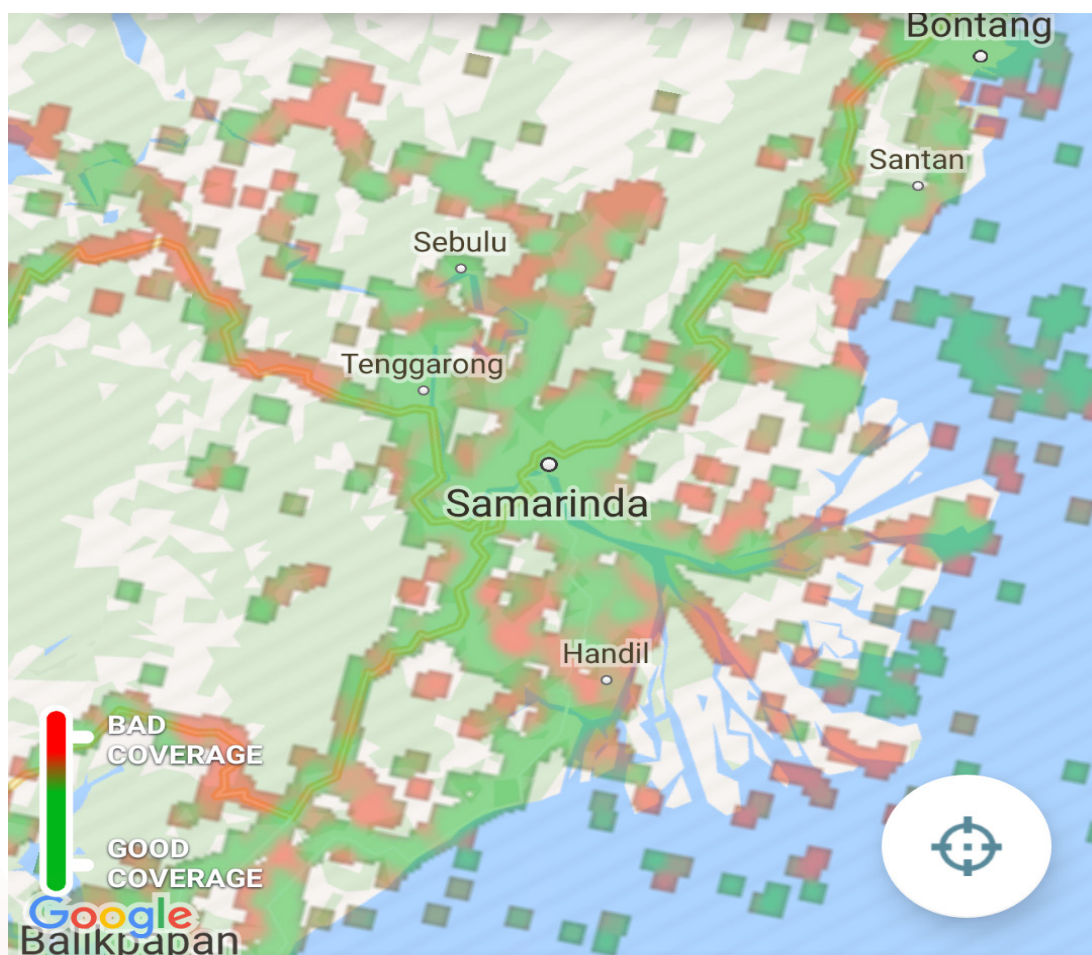
Gambar 3.3. Topologi Fiber Optic Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 3.4. Topologi NOC-DC di Diskominfo Kukar

Ketersediaan infrastruktur TIK juga didukung oleh peran serta dari berbagai perusahaan telekomunikasi dengan dukungan pembangunan infrastruktur seperti tower seluler, PSTN, fiber optic dan microwave. Terdapat 4 provider seluler, 1 provider PSTN & ADSL yang beroperasi di Kab.Kukar.

Data terbaru hasil scanning menggunakan tool OpenSignal (gambar 3.5), masih terdapat banyak blank spot atau wilayah yang belum tercakup oleh layanan seluler. Namun sebagian besar wilayah ibu kota kabupaten telah terlayani dengan baik dari berbagai operator seluler.

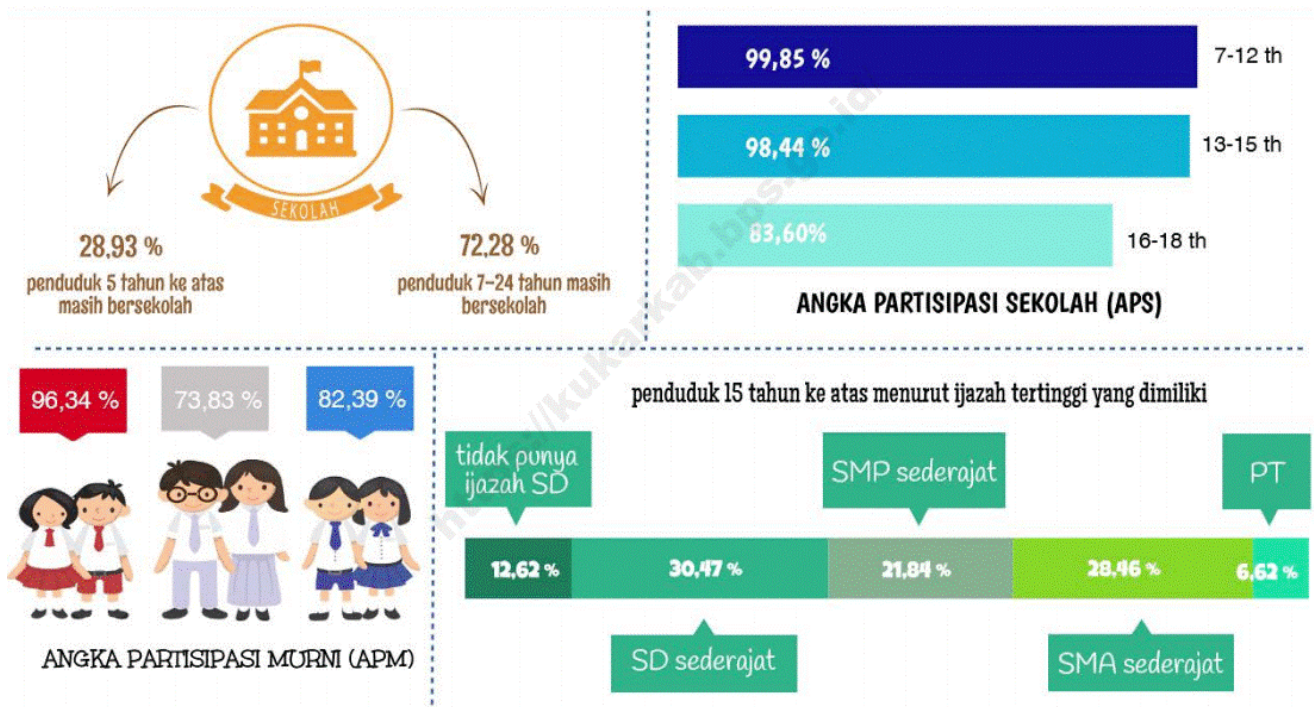


Gambar 3.5. Peta kualitas dan cakupan layanan Seluler di Kab.Kukar

3.2.3. Sosial

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan kesehatan masyarakatnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur. Berdasarkan data 2015 hanya Kab.Kukar yang memiliki 3 rumah sakit daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit di Kec. Tenggarong Seberang, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kec Samboja dan Rumah Sakit Dayaku Radja di Kecamatan Kota Bangun.

Untuk mendukung ketersediaan SDM yang baik, Pemkab. Kukar di tahun 2016, memiliki jumlah SD NEGERI sebanyak 434 unit, SMP NEGERI sebanyak 97 unit dan SMA NEGERI sebanyak 30 unit. (untuk sekolah swasta, ada 25 SD swasta, 36 SMP swasta, dan 16 SMA swasta). Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia sekolah dasar cukup besar, keduanya berada di atas 95% seperti yang terlihat pada gambar



Gambar 3.6. Statistik Kondisi Pendidikan di Kutai Kartanegara.
 (Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2016)

Kab. Kukar memiliki tempat rekreasi yang cukup beragam, terdapat sekitar 30 tempat rekreasi pada tahun 2016 dengan jumlah kunjungan mencapai 1.822.286 orang. Sedangkan untuk objek wisata, terdapat 4 jenis model wisata, yaitu wisata sejarah; alam; pendidikan dan buatan. Total seluruh objek wisata yang ada di Kab. Kukar pada tahun 2016 tercatat sebanyak 39 objek. Museum Mulawarman merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, jumlah wisatawan pengunjung museum tahun 2016 sebesar 171.063 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 150.490 orang.

Sebagian besar Penduduk Kutai Kartanegara beragama Islam, selebihnya beragama Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu, dan beragama lainnya. Untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangun beberapasarana ibadah. Sarana ibadah tersebut terdiri atas 563 Masjid, 660 Langgar, 48 Musholla, 164 Gereja Protestan, 37 Gereja Katholik, dan 15 Purayang masing-masing tersebar merata hampir diseluruh Kecamatan.

3.3. Suprastruktur

3.3.1. Kebijakan

Dalam proses assessment Pemingkatan e-Gov Indonesia yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim, pada tabel 3.5 Kab.Kukar mendapatkan skor sebesar 3,2 (dari skala 0 - 4) pada Dimensi Kebijakan, artinya kebijakan Pemkab Kukar untuk mendukung implementasi TIK dalam business process Pemerintahan sudah sangat baik. Sedangkan untuk mendukung terbentuknya Smart Regency Kutai Kartanegara, beberapa peraturan telah ditetapkan melalui keputusan DPRD dalam bentuk Perda dan Surat Keputusan Bupati seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.6. Perda No.7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara telah memuat kebijakan tentang Smart City yang akan dideskripsikan dalam bagian 5 buku ini. Bupati Kutai Kartanegara juga telah mengeluarkan 2 SK terkait tim yang akan menjadi Dewan dan Tim Pelaksana Smart City.95% seperti yang terlihat pada gambar

Tabel 3.5 Skor Total Per Dimensi PeGI PEMERINTAH Kabupaten Kutai Kar-

SKOR TOTAL Per DIMENSI	
Dimensi: Aplikasi	2,6
Dimensi: Infrastruktur	3,4
Dimensi: Kebijakan	3,2
Dimensi: Kelembagaan	2,7
Dimensi: Perencanaan	2,8
Rata-rata	2,94

Tabel 3.6. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya peraturan daerah tentang dewan smart city daerah	1 SK	Baik		
2	Adanya peraturan Kepala Daerah tentang Tim pelaksana Smart city	1 SK	Baik		
3	Adanya masterplan smart city daerah	Dalam proses			
4	Adanya peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	1 Perda (RPJMD)		Sedang	
5	Adanya Visi pembangunan Smart City yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	1 Perda (RPJMD)		Sedang	
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang	2 SK 1 Perda (RPJMD)	Baik		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program Smart City	Dalam proses			

3.3.2. Kelembagaan

Pemkab Kukar telah memiliki Dewan Smart City Daerah dan Tim Pelaksananya, di dalam dewan dan tim pelaksana ada perwakilan dari OPD dan stake holder lain yang terkait dengan pengembangan Smart Regency Kutai Kartanegara. Penilaian PeGI dalam tabel 3.7 pada Dimensi Kelembagaan Pemkab Kukar memperoleh nilai sebesar 2,7 hal ini menunjukkan secara organisasi Pemkab Kukar telah bertanggung jawab dengan baik terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.

Tabel 3.7. Analisis kesiapan kelembagaan daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interprestasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan Smart City daerah	1 Tim		Sedang	
2	Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah	1 Tim	Baik		
3	Adanya SOP smart city daerah	Dalam proses			
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim pelaksana Smart City di setiap OPD	Ada	Baik		

3.4. Kesiapan Masyarakat (Culture)

Kemampuan masyarakat Kab. Kukar dalam melakukan transformasi budaya sudah dikenal di seluruh nusantara. Kerajaan Kutai adalah bukti dimana masyarakat Kutai memulai peradaban modern terstruktur pertama yang tercatat oleh sejarah dengan pembuatan batu-batu prasasti yang terdapat di beberapa tempat. Setelah berdirinya Republik Indonesia, Kerajaan Kutai dan masyarakatnya kembali melakukan perubahan dari model kerajaan ke model demokrasi terpimpin dengan tidak melupakan akar budaya dari Kerajaan Kutai. Sehingga Kerajaan Kutai, Raja dan keturunannya serta para bangsawan kerajaan kutai tetap eksis sampai dengan sekarang. Adanya keturunan dan keluarga penjaga akar budaya Kerajaan Kutai, membuat masyarakat Kutai masih melakukan berbagai kebiasaan turun temurun seperti budaya Erau yang sekarang menjadi festival budaya bertaraf Internasional. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Kutai selain dapat menjaga warisan budaya juga mulai terbuka dengan pihak luar baik dalam maupun luar negeri. Keterbukaan dengan pihak-pihak dari luar Kab.Kutai akan mendorong terjadinya interaksi yang positif seperti perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mendorong kemajuan bagi masyarakat Kab.Kukar.

3.5. Nature

Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal dengan Sumber Daya Alam yang berlimpah dan beragam, baik sumber-sumber yang terbarukan maupun tidak (pertambangan, minyak dan gas alam). Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014. Ekosistem Hutan Hujan Tropis yang terlindungi masih merupakan bagian SDA yang potensial untuk

dikembangkan di Kab.Kukar. Terdapat areal hutan-hutan yang di lindungi di kabupaten ini, antara lain:

1. Cagar Alam, 32.081,4 ha
2. Taman Nasional, 40.974,00 ha
3. Taman Hutan Raya, 61.599,56 ha
4. Hutan Lindung, 210.097,62 has

Kondisi geografis Kab.Kukar yang cukup beragam memberikan keuntungan terhadap sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Di sektor padi sawah, Tenggarong Seberang adalah peringkat pertamanya. Luas panen padi sawah sebesar 7.848 ha dan produksinya mencapai 41.863 ton. Sehingga produktivitasnya 53 kw/ha, ini berarti 24,08 % produksi padi sawah di Kutai Kartanegara dihasilkan oleh Kecamatan Tenggarong Seberang. Di sektor padi ladang, Tabang adalah daerah yang memiliki luas panen dan produksi terbesar di tahun 2015, yaitu luas panen 1.440 ha dan produksi padi ladang mencapai 5.604 ton.

Begitu pula halnya dengan produksi buah-buahan, produksi buah-buahan tertinggi dimiliki oleh komoditas pisang yaitu 15.187,50 ton yang mayoritas berasal dari Tenggarong. Pada tahun 2015, luas perkebunan rakyat di Kutai Kartanegara adalah 60.462,15 ha dengan total produksi sebesar 265.955,52 ton. Dari berbagai komoditas perkebunan tersebut, kelapa sawit memiliki produksi terbesar yaitu 225.942,66 ton. Kemudian disusul karet dengan produksi tertinggi di Kecamatan Marangkayu sebesar 1.912 ton, kelapa produksi terbesar di Kecamatan Muara Jawa sebesar 1.775 ton dan Lada produksi terbesar ada di kecamatan Loa Janan sebesar 2.127 ton.

Kekayaan alam yang bersumber dari laut dan sungai di Kab.Kukar juga sangat melimpah, terbukti dengan meningkatnya produksi Perikanan Tangkap di tahun 2015 sebesar 66.392,90 ton dari 65.495,70 ton di tahun 2014. Produksi Perikanan Budidaya juga mengalami peningkatan sebesar 5.944 ton dari 65.270,80 ton di tahun sebelumnya, walau areal Usaha Budidaya Perikanan menurun dari 76.673,00 ha menjadi 58.868,90 ha di tahun 2015. Peningkatan produksi perikanan dan penurunan areal usaha budidaya perikanan dapat dijadikan indikator bahwa produktivitas di sektor ini meningkat dan kualitas ekosistem perairan mendukung produksi ikan, udang dan komoditas lainnya.

IV. Analisis Gap



4.1. Gambaran Umum

Terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat menjadi titik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan smart regency di Kab Kukar. Secara umum, kawasan Kutai Kartanegara masih di kenal masyarakat Indonesia sebagai wilayah yang kaya dengan Sumber Daya Alam berupa hasil migas dan pertambangan. Secara historis, Kab. Kukar terdapat Kerajaan Kutai di kenal sebagai bentuk pemerintahan kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah di Indonesia.

Kondisi Geografis Kukar cukup beragam, mulai dari kawasan pantai, delta sungai, aliran sungai hingga pegunungan, dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, hal ini memberikan efek positif untuk pengembangan jenis-jenis usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan wisata. Kab. Kukar juga berbatasan dengan 2 Kota yang cukup besar dan padat penduduknya, yaitu Samarinda dan Balikpapan, serta 1 kota berbasis industri yaitu Bontang. Ketiga kota ini memiliki potensi masing-masing yang juga dapat menjadi ancaman bagi Kab. Kukar.

4.2. Perumusan Strategi

4.2.1. Smart Governance

Faktor Internal (S & W)	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal (O & T)	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan infrastruktur TIK, berupa jaringan Fiber Optic yang menjangkau seluruh OPD di kawasan Ibu Kota Kabupaten dan Tower untuk Jaringan Wireless LAN di 22 titik kecamatan. Memiliki berbagai macam layanan internal pemerintahan dan layanan kepada masyarakat yang telah didukung dengan Aplikasi/Sistem Informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Berbagai Sistem Informasi yang ada di OPD Pemkab Kukar belum terintegrasi, sehingga masih terjadi duplikasi data atau proses.
	<p>Peluang (Oppotunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah menyediakan proses perizinan dengan aplikasi sampai tingkat kecamatan dan seluruh proses gratis kecuali untuk IMB. 	<ol style="list-style-type: none"> Berbagai aplikasi di tingkat kecamatan dapat di hubungkan dengan memanfaatkan infrastruktur TIK
<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingginya jumlah kepemilikan beberapa perusahaan pada sektor strategis (energi) di Kab.Kukar yang berasal dari investor atau perusahaan dari Luar Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan memberikan kemudahan layanan dalam proses perizinan, diharapkan jumlah investor atau perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Kukar akan meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> Integrasi Data/Sistem Informasi akan mengurangi duplikasi data dan proses berulang yang dapat terjadi dalam prosedur perizinan.

4.2.2. Smart Branding

Faktor Internal (S & W)	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal (O & T)	<ol style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Logo dan Jargon Smart Regency Kutai Kartanegara Pemerintah menyediakan proses perizinan dengan aplikasi sampai tingkat kecamatan dan seluruh proses gratis kecuali untuk IMB. 	<ol style="list-style-type: none"> Produk lokal belum punya ciri khas yang seragam Masih banyak UMKM yang belum berizin dan banyak produk makanan yang belum memiliki label PIRT
Peluang (Opportunities)	<ol style="list-style-type: none"> Setiap produk lokal dari Kab Kukar akan menyertakan Logo atau Jargon Smart Regency 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam setiap proses perizinan, pemohon diwajibkan untuk menyertakan logo dan jargon dalam produknya
Ancaman (Threat)	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah memfasilitasi UMKM dalam proses perizinan dan label PIRT 	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi jumlah UMKM yang belum berizin dan meningkatkan jumlah kepemilikan label PIRT

4.2.3. Smart Economy

Faktor Internal (S & W)	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal (O & T)	<ol style="list-style-type: none"> Ada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan secara legal sebagai kawasan parkir kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan parkir
Peluang (Opportunities)	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target bagi hasil dan target pencapaian pemasukan dari hasil pengelolaan parkir 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 dapat menyediakan aplikasi untuk mendukung pengelolaan parkir yang baik
Ancaman (Threat)	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki pengelolaan parkir menggunakan sistem parkir dengan dukungan IT Menertibkan kendaraan yang parkir dan juru parkir liar 	<ol style="list-style-type: none"> Mulai menggunakan aplikasi untuk melaporkan kehadiran juru parkir liar dan kendaraan yang tidak mau membayar retribusi parkir

4.2.4. Smart Living

Faktor Internal (S & W)	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal (O & T)	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat kawasan Pulau Kumala untuk pusat rekreasi warga Memiliki Museum Mulawarman Memiliki kawasan-kawasan wisata alam yang lengkap Tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan-kawasan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Pulau Kumala dan objek wisata lainnya belum dikelola dengan baik Belum ada dukungan TI untuk memudahkan pengunjung
Peluang (Opportunities)	<ol style="list-style-type: none"> Membuka wahana-wahana baru untuk menarik minat pengunjung Meningkatkan jumlah fasilitas publik sehingga angka kunjungan dari wisatawan lokal dan manca dapat meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta Menggunakan TI untuk memudahkan pengunjung pusat rekreasi dan museum mulawarman, misalkan menggunakan e-ticket dan e-money yang terintegrasi dalam sebuah smart card
Ancaman (Threat)	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan ketersediaan infrastruktur di kawasan publik untuk membangun sistem keamanan dan pengawasan terpadu Meningkatkan promosi dan menggali keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kab Kukar 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola kawasan rekreasi, wisata dan publik terutama dalam hal keamanan dan ketertiban Mengimplementasikan layanan-layanan berbasis TI seperti penggunaan QR Code, Augmented Reality, IP Cam dan menggunakan fasilitas promosi di media sosial

4.2.5. Smart Society

<p>Faktor Internal (S & W)</p> <p>Faktor Eksternal (O & T)</p>	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas pengguna internet di Kukar mengakses dari rumah dan layanan Sosial Media yang terbanyak digunakan 2. Daya beli masyarakat untuk ketersediaan perangkat akses/gadget dan biaya akses/data relatif tinggi. 3. Ada Dinas yang bertanggungjawab sebagai pusat pengelolaan IT di Kab. Kukar (Diskominfo) 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki forum komunikasi khusus warga Kukar atau wilayah-wilayah tertentu di Kab.Kukar (misalkan Tenggara) untuk bertukar informasi 2. Hanya sedikit yang menggunakan internet untuk kegiatan belajar 3. Kurang keterlibatan pemerintah dalam media social atau forum komunikasi warga
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Gedung Pusat Komunitas Kreatif di Sanga-sanga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan Internet secara cerdas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan social media sebagai forum komunikasi bersama untuk update informasi terkini di Kab Kukar
<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoax atau informasi yang menyesatkan warga 2. Konten negatif yang masuk melalui internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Diskominfo dapat dilakukan penyaringan konten negatif bekerjasama dengan Kemenkominfo & Provider Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum-forum online sebagai wadah bertukar informasi 2. Meningkatkan konten-konten pembelajaran agar dapat digunakan oleh warga Kukar 3. Meningkatkan keterlibatan pemerintahan dalam media social atau forum online komunikasi warga

4.2.6. Smart Environment

<p>Faktor Internal (S & W)</p> <p>Faktor Eksternal (O & T)</p>	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dalam perizinan tambang melibatkan Pemkab Kukar untuk proses keluarnya izin. 2. Ketersediaan infrastruktur TIK, berupa jaringan Fiber Optic yang menjangkau seluruh OPD di kawasan Ibu Kota Kabupaten dan Tower untuk Jaringan Wireless LAN di 22 titik kecamatan 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki sistem peringatan dini akan bahaya banjir 2. Tidak ada proses monitoring dari pemerintah dan/atau pengawasan masyarakat setempat untuk penggunaan lahan pasca tambang
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Sumber Daya Alam migas dan nonmigas yang belum dimanfaatkan dalam jumlah yang banyak dan cukup beragam. 2. Kondisi Geografis dari wilayah pantai hingga pegunungan dan DAS Mahakam dengan curah hujan tinggi dan penyebaran yang merata sepanjang tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan layanan dalam proses perizinan namun tetap memperhatikan faktor/kondisi agar lingkungan tidak rusak/tercemar 2. Menggunakan ketersediaan infrastruktur TIK untuk memantau kondisi geografis agar dapat dimanfaatkan sektor lain (misalkan pertanian dan pariwisata) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang akan mengelola/ memanfaatkan SDA untuk membuat sistem peringatan dini dan pengawasan
<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan pasca tambang ditinggalkan tanpa pengelolaan untuk proses pemulihan/peralihan menjadi lahan produktif 2. Curah hujan tahunan tinggi dan DAS Mahakam yang dapat menyebabkan banjir dalam jangka waktu relatif lama dan luasnya kawasan yang tergenang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada uang jaminan pemulihan lahan pasca tambang pada saat proses perizinan tambang diberikan 2. Terdapat infrastruktur TI yang dapat di dimanfaatkan untuk implementasi IoT atau sistem peringatan dini bahaya banjir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem monitoring/ pengawasan lahan tambang 2. Membangun sistem peringatan dini akan bahaya banjir dan mengolah big data cuaca/iklim dari berbagai sumber untuk penanganan banjir

V. Analisis Visi Pembangunan Smart City



5.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

- **MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- **MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- **BERKEADILAN** : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kutai Kartanegara 2016-2021

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Maju	Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
	Mandiri	Misi 3: Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
		Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
Sejahtera	Misi 6: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten	
Berkeadilan	Misi 7: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai impact makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson

Tabel 5.2. Sasaran Makro dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

SASARAN MAKRO	TARGET					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi *)	2,77	3,34	4,28	4,62	5,15	4,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas *)	4,33	5,13	5,08	4,7	5,4	5,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas & Batubara *)	5,17	5,76	6,03	6,15	6,48	7,04
Laju Inflasi*)	7,63	7,22	7,06	6,99	6,96	6,94
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	72,93	73,78	74,64	75,36	76,31	77,21
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,62	71,64	71,68	71,72	71,76	71,79
2. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13,84	14,27	14,62	14,89	15,3	15,74
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	8,89	8,97	9,1	9,27	9,43	9,56
4. Nilai Pengeluaran Perkapita	10,485.89	10,768.92	11,062.57	11,260.40	11,545.70	11,805.07
Gini Rasio	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
Persentase tingkat Kemiskinan	7,19	7,01	6,22	5,92	4,83	4,23
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,23	9,02	8,93	8,89	8,87	8,86
Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,6	0,53	0,51	0,5	0,48	0,45

5.2. Sasaran Smart City Daerah

Tujuan Misi Kelima dalam RPJMD Kab.Kukar adalah menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan salah satu sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet dan pengembangan kawasan smart city, dengan dua indikator, yaitu :

1. Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/Desa/Kelurahan
2. Jumlah Kawasan Berbasis IT

Kaitan antara misi, tujuan, sasaran, indikator serta target tahunan dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kab. Kukar 2016- 2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city.	Cakupan koneksi internet Kecamatan/ Desa/Kel	31%	50%	65%	80%	90%	100%
			Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi Di era teknologi ini, pengembangan smart city dianggap mampu membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pengembangan smart city tidak hanya akan fokus dalam penyediaan akses internet bagi masyarakat tetapi juga pengembangan aplikasi yang mampu membantu Pemerintah setempat untuk mengetahui berbagai potensi dan permasalahan pembangunan yang ada secara cepat. Sehingga apabila terjadi permasalahan pembangunan dapat segera diatasi. Arah kebijakan:
 - a. Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Pengembangan dan pembangunan tower pintar.
2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan aplikasi informasi terintegrasi.
 - b. Pengembangan layanan berbasis online.

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4. Arah Kebijakan Kewilayahan: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city

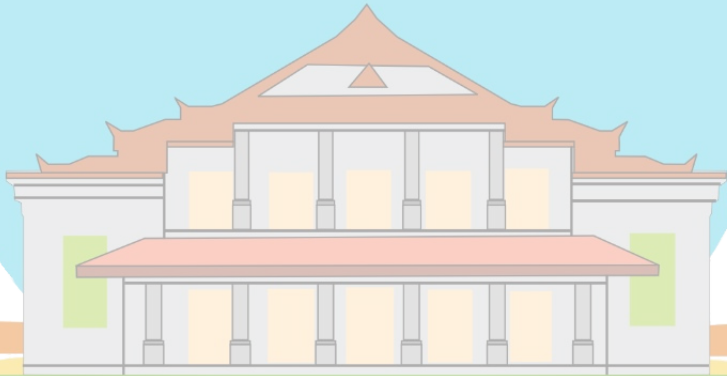
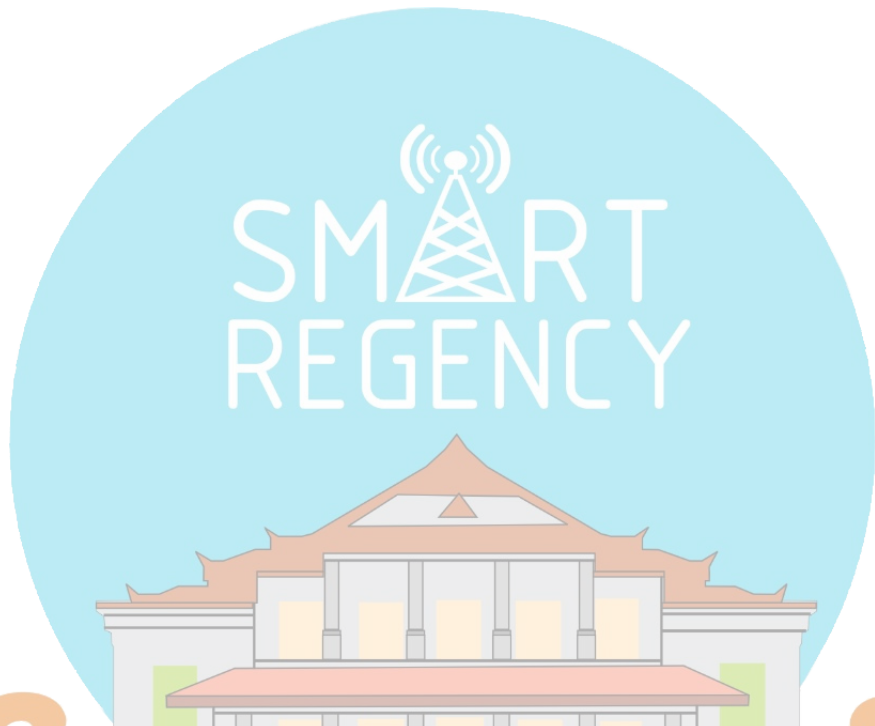
TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3
Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk public	Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk publik
Pengembangan Rencana Tower Pintar	Tenggarong	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah	Pembangunan Tower Pintar
Penyusunan Grand Design Smart City	Kabupaten Kukar	Penyiapan ke bijakan dan payung hukum pembangunan smart city	Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu
-	-	-	-	Pengembangan pelayanan online

Tabel 5.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Misi Kelima

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet dan pengembangan kawasan smart city	Peningkatan Konektivitas	1 Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Urusan Wajib	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
	Jaringan Telekomunikasi	2 Pengembangan dan pemban-	Komunikasi	
			Informatika	
	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	1 Pembangunan aplikasi informasi terintegrasi 2 Pengembangan layanan berbasis online		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi

KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu
Wilayah Tengah dan Hilir	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu
Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu	Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu	Kabupaten Kukar
Kabupaten Kukar	Pengembangan pelayanan online	Kabupaten Kukar	Pengembangan pelayanan online	Kabupaten Kukar

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Layanan E-Government	46%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan wilayah yang terlayani Jaringan Telekomunikasi Seluler	31%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Layanan Internet Ke Sekolah-sekolah	35%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	n.a	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Rasio Wartel / Warnet terhadap Penduduk	0.02%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Layanan Pos dan Telekomunikasi	7%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Layanan Internet di Kecamatan/Desa/Kelurahan	31%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD	46%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	65%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika



KUTAI KARTANEGARA





BUKU 2

MASTERPLAN SMART REGENCY

Kata Sambutan Kepala Daerah



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebijakan pembangunan Kutai Kartanegara melalui grand strategi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan panduan dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan provinsi serta dengan perencanaan pembangunan nasional.

Visi GERBANG RAJA yaitu “Mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan” menitikberatkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kutai Kartanegara yang direfleksikan dalam semangat/spirit

HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Oleh karena itu, GERBANG RAJA ditempatkan sebagai mainstream pembangunan, yang akan mewarnai seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sudah saatnya, kini kita harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk bersama-sama dalam melanjutkan tugas berat. Tugas berat itu bisa kita pikul dengan bersama dalam semangat persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan, gotong royong dan kerja keras adalah syarat bagi kita untuk menjadikan Kutai Kartanegara tetap bermartabat. Bermartabat di Kalimantan Timur, bermartabat di mata Indonesia dan di mata Dunia.

Selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, kami dan seluruh stake holder pembangunanyangadadiKabupatenKutaiKartanegaraberkomitmenuntukmengakselerasipembangunandi Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyikapi pelaksanaannya dengan mewujudkan inovasi yang berbasis kearifan lokal.

Pada Kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara yang telah mencanangkan Gerakan Menuju 100 Smartcity.
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan yang telah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 25 Kabupaten/Kota menuju 100 Smartcity.
3. Dewan Smart Regency dan Tim Pelaksana Smart Regency Kutai Kartanegara yang telah bersusah payah menyelesaikan buku masterplan.

Akhir kata, mari kita sambut hari esok dengan penuh semangat, penuh harapan dan GERBANG RAJA dengan Smart Regency siap mengantarkan Rakyat Kutai Kartanegara menuju “Gerbang Kejayaan Kutai Kartanegara”.

“ETAM KAWA, KUTAI KARTANEGARA BISA”

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Kata Sambutan Sekretaris Dewan Smart Regency



Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, seraya mengapresiasi kerja keras anggota Dewan Smart Regency dan Tim Pelaksana Smart Regency yang dipandu oleh tim pembimbing, Bapak Barry Simorangkir dan Bapak Farid Subkhan, Bapak Nova Zanda dan Ibu Chairina dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan karena dalam waktu singkat dapat menyelesaikan penyusunan buku masterplan Smart Regency ini.

Smart Regency Kutai Kartanegara dengan visinya “Mewujudkan akselerasi

kemajuan Kutai Kartanegara melalui inovasi berbasis kearifan lokal” diharapkan mampu membuat Kutai Kartanegara bangkit dari keterpurukan dan ketergantungan pendapatan dari sumber daya alam tak terbarukan (non renewable resources).

Kami berharap buku masterplan Smart Regency ini dapat menjadi rujukan/pedoman induk yang komprehensif dan sistematis bagi stake holder dalam melaksanakan pembangunan Smart Regency di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui inovasi berbasis kearifan lokal sehingga akselerasi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tak lupa kami juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak yang berperan aktif dan banyak membantu kelancaran dalam penyusunan buku masterplan Smart Regency ini.

Hanya sebuah utopia apabila mengharapkan kesempurnaan dari hasil karya manusia, oleh karena itu kami menyadari masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dalam masterplan ini. Semoga masterplan Smart Regency ini, tidak hanya menjadikan Kutai Kartanegara mempunyai daya saing tinggi, namun juga kaya dengan inovasi dan praktik cerdas pelayanan publik serta nyaman dan menyenangkan untuk dihuni.

SEKRETARIS DEWAN SMART REGENCY

Ir. H. Marli, M.Si.

1. Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kab.Kukar) merupakan daerah dimana terletak kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai yang sekaligus menjadi tonggak bersejarah nusantara dalam hal pemerintahan yang terstruktur. Wilayah kabupaten juga kaya akan hasil minyak dan gas bumi dan bahan-bahan tambang seperti batu bara dan emas. Terletak di Daerah Aliran Sungai Mahakam dan Delta Mahakam dengan kontur bumi yang cukup beragam, mulai dari pantai, sungai, dataran rendah hingga dataran tinggi, menjadikan posisi geografis Kab.Kukar vital terhadap perkembangan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai jantung dan jalur perekonomian, pendorong ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan.

Keberagaman pada kondisi geografis Kab.Kukar juga memberikan keuntungan terhadap sektor pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan, yang masih berpotensi besar untuk menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Serta dapat mengurangi perekonomian yang tergantung pada sektor tambang dan migas yang sering berdampak negatif terhadap lingkungan dan sustainibilitas usaha-usaha di dua sektor ini. Melalui peningkatan berbagai usaha pada sektor pariwisata dan pertanian diharapkan dapat mewujudkan tujuan dalam RPJPD dan RPJMD Kab. Kukar 2016-2020, yaitu : “Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari”

Untuk mengakselerasi dan menciptakan sinergi positif dari berbagai stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan RPJMD Kab.Kukar maka hal ini dapat diwujudkan dengan melalui program Kutai Kartanegara Smart Regency yang juga merupakan bagian dari sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD. Selain itu Kab.Kukar juga telah terpilih untuk menjadi pilot project dalam program menuju 100 Smart City yang ditetapkan dalam SK Kemenkominfo RI Nomor 265.KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017. Dengan adanya dua ketetapan hukum di atas, maka perlu dibuat sebuah Master Plan Kutai Kartanegara Smart Regency sebagai pedoman Pemkab. Kukar untuk pembangunan yang cerdas dalam menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dengan sektor pariwisata dan pertanian sebagai penggerak utama yang didukung oleh Teknologi Informasi.

1.2. Tujuan Master Plan

Menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif untuk proses implementasi Smart Regency berdasarkan pada sumber daya yang ada di daerah Kutai Kartanegara dan sesuai dengan regulasi Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

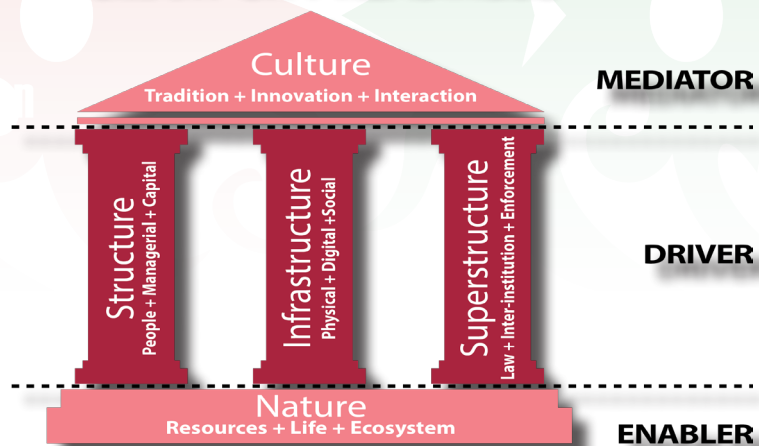
1.3. Landasan Hukum

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.**
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.**
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.**
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.**
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).**
- 8. Permen Kominfo Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola E-Government Nasional.**
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kota/ Kota.**
- 10. Kepmen Kominfo No.69A Tahun 2004 Tentang Panduan Teknis Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Panduan Teknis Manajemen Data, Informasi dan Organisasi Sistem Informasi Pemerintahan.**
- 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; keputusan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya TIK.**
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.**
- 13. Surat Keputusan Kemenkominfo RI Nomor 265.KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assesment Gerakan Menuju 100 Smart City.**
- 14. Surat Keputusan Bupati Kukar No.231/SK-BUP/HK/2017 Tentang Pembentukan Dewan Kutai Kartanegara Smart Regency .**
- 15. Surat Keputusan Bupati Kukar No.232/SK-BUP/HK/2017 Tentang Tim Pelaksana Kutai Kartanegara Smart Regency .**

1.4. Kerangka Pikir Smart City atau Smart Regency

Terdapat banyak framework yang dapat digunakan untuk membangun sebuah kota cerdas atau smart city. Namun tidak ada 1 framework spesifik yang cocok untuk dapat diterapkan pada semua kota atau kawasan (kabupaten, distrik dan lainnya), sehingga setiap kota harus memilih untuk mengembangkan framework yang ada atau membuat sendiri sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan dari kota tersebut. Kutai Kartanegara Smart Regency dibangun menggunakan framework dari Citiasia yang kemudian di sesuaikan dengan potensi lokal dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Kab.Kukar. Kesiapan Kab.Kukar telah dinilai layak untuk melaksanakan program Smart City oleh assessor berdasarkan elemen-elemen dalam Smart City Readiness seperti pada gambar 1.1. Dengan deskripsi perelemen secara lengkap telah tersaji pada Buku 1. di bagian Analisis Kesiapan Daerah.

SMART CITY READINESS



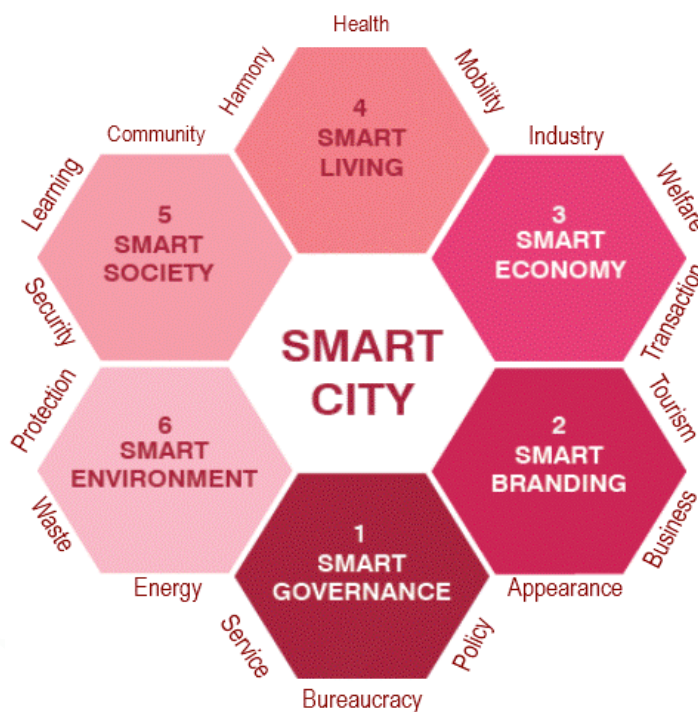
Gambar 1.1. Elemen Smart City Readiness (Sumber : Citiasia Inc)

Berdasarkan hasil assessment, dapat dibangun sebuah kota/kabupaten pintar yang berlandaskan pada dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Smart Governance
2. Smart Branding
3. Smart Economy
4. Smart Living
5. Smart Society
6. Smart Environment

Sedangkan untuk Sub dimensi smart city dapat dilihat pada gambar 1.2 dengan sasaran masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public 2. BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah 3. Public POLICY, Peningkatan efisiensi Kebijakan Publik 4. TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata 5. BUSINESS, Membangun daya saing Bisnis (TTI dan Industri Kreatif) 6. City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota 7. INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier 8. WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat 9. TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan 10. HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman 11. HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan 12. MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik 13. COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart | <ol style="list-style-type: none"> 14. LEARNING, Membangun sistem Edukasi 15. SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan 16. PROTECTION, Perlindungan Lingkungan 17. WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah 18. ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan. |
|--|---|



Gambar 1.2. Dimensi Smart City (Sumber : Citiasia Inc)

2. Visi Kutai Kartanegara Smart Regency



Pemerintah Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2016-2021 telah menetapkan program kerja Kutai Kartanegara Smart Regency yang dibagi menjadi beberapa kawasan berbasis Teknologi Informasi. Bupati melalui SK Nomor 231 dan 232 tahun 2017 telah menetapkan Dewan dan Tim Pelaksana yang bertugas untuk membuat Master Plan dan mengimplementasikan program kerja yang terdapat di dalamnya. Bersama dengan itu telah ditetapkan bahwa Visi Kutai Kartanegara Smart Regency adalah: “Mewujudkan akselerasi kemajuan Kutai Kartanegara Melalui Inovasi yang Berbasis Kearifan Lokal”

2.1. Sasaran Jangka Pendek Kutai Kartanegara Smart Regency

Dalam jangka 1 tahun setelah penetapan Tim Pelaksana, Pemkab Kukar akan melakukan 2 program kerja, yaitu : penyusunan Master Plan Kutai Kartanegara Smart Regency dan Program Kerja Quick Win. Quick Win merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dengan cepat dengan tingkat keberhasilan tinggi dan yang manfaatnya cukup signifikan untuk kemajuan daerah dalam mempersiapkan program kerja jangka panjang atau yang lebih besar. Sasaran yang ingin dicapai dari program kerja quick win antara lain :

1. mendapatkan momentum awal yang positif untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang lebih berat/ besar (program jangka panjang).
2. meningkatkan kepercayaan dari pihak internal (pemda) dan masyarakat sehingga muncul peningkatan dukungan dan partisipasi dari banyak pihak.

2.2. Sasaran Jangka Panjang Kutai Kartanegara Smart Regency

Sasaran Kutai Kartanegara Smart Regency dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson

Jika sasaran dalam RPJMD kita petakan terhadap dimensi-dimensi dalam pembangunan Smart City (pada Framework Citiasia), maka akan terlihat seperti Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Indikator Sasaran RPJMD dan Dimensi Smart City/Regency

Indikator Sasaran	Dimensi Smart City (Framework Citiasia)
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun	Smart Governance; Smart Economy; Smart Branding;
Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun	Smart Governance; Smart Economy; Smart Branding;
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Smart Governance; Smart Living; Smart Society; Smart Environment
Menurunnya Gini Rasio	Smart Economy; Smart Living; Smart Society;
Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan	Smart Economy; Smart Society;
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Smart Economy; Smart Society;
Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson	Smart Governance; Smart Economy;

3. Strategi Pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency



3.1. Smart Governance

Dimensi Smart Governance berfokus pada pengelolaan dan manajemen suatu kota atau kabupaten agar seluruh aspek dari pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota atau kabupaten tersebut.

Terdapat tiga sub elemen dalam Smart Governance, yaitu :

1. **SERVICE**, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public
2. **BUREAUCRACY**, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah
3. **POLICY**, Peningkatan efisiensi Kebijakan Publik

Tabel 3.1. Strategi dan Indikator Capaian Smart Governance

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
SERVICE	1. Meningkatnya pelayanan terhadap publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki proses layanan publik yang berkesinambungan (continuous improvement) 2. Menerapkan survey kepuasan layanan publik pada setiap proses layanan 3. Memperbanyak jumlah layanan publik
	2. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan dan adanya sistem ketahanan pangan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sektor pertanian, peternakan dan perikanan 2. Perbaikan jalur distribusi pangan 3. Pembuatan sistem monitoring harga dan ketersediaan pangan
	3. Meningkatnya dan perbaikan ketersediaan infrastruktur dan sarana monitoringnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, sarana-prasarana: kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, air bersih dan lain-lain) 2. Pembuatan sistem monitoring infrastruktur (CCTV/IPCam, sistem pelaporan kerusakan infrastruktur dari masyarakat)
BUREAUCRACY	1. Perbaikan terhadap tata kelola birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Standar (Operasional, Prosedur Dokumen, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi) yang jelas dalam setiap pekerjaan. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Integrasi Sistem Informasi antar OPD
	2. Meningkatnya transparansi dalam pelaksanaan proses pemerintahan	Penerapan Undang-undang KIP secara menyeluruh dan memberikan informasi publik secara rutin pada saluran-saluran komunikasi terutama pada website
POLICY	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan suatu keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbang 2. Penambahan saluran-saluran resmi atau media sosial untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya 3. Peningkatan peran serta pemerintah dalam merespon aspirasi dan keluhan masyarakat

3.2. Smart Branding

Smart branding merupakan terobosan cerdas untuk memperkenalkan suatu daerah yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah melalui 3 elemen, yaitu :

1. **TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata**
2. **BUSINESS, Membangun daya saing Bisnis (TTI dan Industri Kreatif)**
3. **APPEARANCE, Penataan Wajah Kota**

Tabel 3.2. Strategi dan Indikator Capaian Smart Branding

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
TOURISM	Berkembangnya jumlah destinasi wisata	Menyediakan tempat-tempat wisata baru baik wisata alam maupun buatan
	Meningkatnya infrastruktur pendukung pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah dan meningkatkan kualitas Infrastruktur fisik dan komunikasi di sekitar dan lokasi daerah wisata 2. Membuat sistem monitoring infrastruktur dan objek wisata agar tetap terpelihara dengan baik
	Meningkatnya SDM pelaku usaha wisata	Pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris atau bahasa resmi PBB)
BUSINESS	Bertambahnya jumlah sarana-sarana pemasaran produk lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Pasar-pasar tradisional 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemasaran (e-Commerce) 3. Promosi dan Pameran lokal, nasional dan internasional
	Meningkatnya jumlah investor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kemudahan dan insentif untuk para investor 2. Membuat Sistem Investasi/Penanaman Modal Terpadu (Katalog Investasi, Investment Corner/Lounge dan Portal Investasi Daerah) 3. Peningkatan promosi daerah di event nasional dan internasional
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina SDM dalam manajemen, pengolahan dan pemasaran barang/jasa lokal 2. Pemberian modal usaha atau bekerjasama dengan Fintech Pemodal Peer2Peer seperti amantha.com atau modalku.com 3. Pemberian fasilitas pendukung perkembangan UMKM, seperti izin usaha, sertifikasi dan
APPEARANCE	Berkembangnya kawasan Kabupaten yang sesuai dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata ulang wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW 2. Memperbaiki bangunan-bangunan cagar budaya atau yang menjadi landmark kota 3. Menyediakan navigasi fisik dan virtual yang mudah diakses

3.3. Smart Economy

Melemahnya Perekonomian Nasional justru mendorong terobosan-terobosan baru yang cerdas dalam berbisnis. Melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dapat terwujud lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan potensi di daerah yang sudah ada, meningkatkan arus perputaran barang dan uang yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk atau peningkatan PDRB. Smart and Green Economy juga mendorong terciptanya perekonomian dan industri yang ramah dengan lingkungan dengan pengurangan emisi karbon dan efisiensi akan pemakaian sumber daya alam. Elemen dalam Dimensi Smart Economy antara lain :

1. **INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier**
2. **WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat**
3. **TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan**

Tabel 3.3. Strategi dan Indikator Capaian Smart Economy

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
INDUSTRY	Terbangunnya daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri-industri primer yang berbasis pada sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pariwisata 2. Membangun industri pengolahan dari hasil-hasil (bahan mentah) di industri primer agar meningkat nilai jualnya 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan lokal yang berciri khas tertentu (Unik) pada industri tersier
WELFARE	Meningkatnya serapan angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program peningkatan SDM angkatan kerja, misalkan dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi 2. Memfasilitasi penyedia lapangan pekerjaan dengan pencari kerja dengan menyediakan event seperti bursa kerja atau situs pencari kerja lokal
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau berbasis rumah tangga (UMKM) 2. Memfasilitasi industri rumah tangga untuk mendapatkan izin dan sertifikasi
TRANSACTION	Menurunnya penggunaan uang kartal (cash) dan Meningkatnya penggunaan e-money	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan channel-channel pembayaran non tunai 2. Memberikan kemudahan, insentif atau promosi untuk penggunaan e-money baik dari sisi penjual maupun pembeli 3. Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital, seperti ketersediaan koneksi internet melalui jaringan seluler berbasis 3G/4G 4. Memfasilitasi pertemuan pihak-pihak seperti BI (regulator), perbankan, e-money provider, provider telekomunikasi dan pengusaha untuk membahas isu-isu terkait implementasi transaksi non tunai
	Peningkatan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta pengusaha dalam memanfaatkan e-commerce dan market place untuk membantu pemasaran 2. Mendorong pertumbuhan Startup dan Fintech lokal yang dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya

3.4. Smart Living

Dimensi Smart Living berfungsi untuk menyediakan tempat hidup yang layak bagi masyarakat dalam suatu kawasan (kota/kabupaten). Sasarannya adalah terwujudnya lingkungan yang layak untuk di tinggali, nyaman dan efisien. Terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi agar pola hidup layak dapat tercapai, yaitu:

1. **HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman**
2. **HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan**
3. **MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik**

Tabel 3.4. Strategi dan Indikator Capaian Smart Living

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
HARMONY	Kesesuaian lingkungan tempat tinggal dengan Indikator Kota/ Kabupaten Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW dengan kondisi di lapangan. 2. Adanya kawasan terpadu untuk industri atau pusat kegiatan bisnis berwawasan lingkungan
	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Menambah kawasan-kawasan yang dijadikan ruang untuk kegiatan publik, seperti taman bermain dan berekreasi
	Menurunnya tingkat kriminalitas	Meningkatkan sistem monitoring keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan menambahkan pemanfaatan teknologi di dalamnya
HEALTH	Meningkatnya ketersediaan makanan yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan usaha pertanian dan peternakan organik 2. Meningkatkan produksi olahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi
	Meningkatnya fasilitas penunjang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama untuk proses pencegahan penyakit 2. Penambahan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan olah raga, seperti jogging track dan taman dengan alat-alat olah raga 3. Menyediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk ibu hamil dan menyusui di tempat-tempat publik
MOBILITY	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan dan perbaikan infrastruktur penunjang transportasi pribadi dan publik (jalan; jembatan; pelabuhan; terminal) di segala moda transportasi (darat, air dan udara). 2. Menggunakan Area Traffic Control System untuk proses manajemen lalu lintas.

3.5. Smart Society

Melalui Dimensi Smart Society diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang humanis dan dinamis, hubungan antar warga dapat terjalin dengan baik dan tanpa sekat dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga masyarakat menjadi lebih produktif, komunikatif dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi, dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu:

1. **COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart**
2. **LEARNING, Membangun sistem Edukasi**
3. **SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan**

Tabel 3.5. Strategi dan Indikator Capaian Smart Society

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
COMMUNITY	Terwujudnya Interaksi warga yang efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk komunitas-komunitas yang produktif untuk meningkatkan pembangunan daerah 2. Membina komunitas dan melibatkan ke dalam berbagai aspek dalam proses pengambilan keputusan 3. Membangun komunikasi yang positif dan konstruktif dalam media-media sosial
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program-program pengembangan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk hal yang positif dan produktif 2. Mendorong pendidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di mulai dari rumah dengan menyesuaikan aspek kognitif anak
LEARNING	Terwujudnya ekosistem belajar untuk segala kalangan dan tanpa batasan ruang/waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensinergikan pendidikan formal dan informal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk memperoleh pendidikan tersebut 2. Menyediakan tempat-tempat pendidikan Inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus 3. Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, misalkan smart pesantren
SECURITY	Terwujudnya sistem keamanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling dan ronda yang dapat dilakukan oleh warga di tingkat RT 2. Membangun sistem peringatan dini dan penanganan masalah warga seperti aplikasi panic button atau aplikasi pelaporan warga 3. Membangun Sistem Monitoring Keamanan dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (Internet Of Thing) yang terhubung dengan City Command Center

3.6. Smart Environment

Smart Environment merupakan dimensi yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan, agar pembangunan kawasan daerah selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat melestarikan alam sekitar. Dengan terjaganya lingkungan dari segala bentuk kerusakan, maka semua bentuk kehidupan akan terjamin keberlangsungannya. Hal ini dapat di capai melalui implementasi tiga elemen berikut:

1. 1. PROTECTION, Perlindungan Lingkungan
2. 2. WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah
3. 3. ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan.

Tabel 3.6. Strategi dan Indikator Capaian Smart Environment

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
PROTECTION	Berkurangnya pencemaran tanah, air dan udara atau emisi karbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya 2. Menyediakan ruang terbuka hijau serta memberikan porsi yang layak di dalam Perda RTRW 3. Membuat Sistem Monitoring Pencemaran dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (Internet Of Thing) yang terhubung dengan City Command Center 4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengelola lahan-lahan pasca tambang
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitarnya 2. Membuat program gotong-royong untuk membersihkan lingkungan tingkat RT dan tempat kerja 3. Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan
WASTE	Terwujudnya tata kelola sampah dan limbah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah atau sampah rumah tangga, publik dan industri 2. Menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Recycle dan Reuse terhadap limbah atau sampah yang akan dibuang
ENERGY	Terwujudnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan energi fosil secara efisien dan mengurangi ketergantungan terhadapnya 2. Membuat program-program konversi energi fosil ke energi terbarukan, seperti solar cell, bio fuel dan lainnya

4. Rencana Aksi Kutai Kartanegara Smart Regency



4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kutai Kartanegara Smart Regency

Untuk proses implementasi program kerja Kutai Kartanegara Smart Regency, diperlukan dukungan regulasi dan organisasi tertentu yang akan mengelola dan melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Selain pembuatan regulasi, juga perlu adanya sinkronisasi dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang telah ada, sehingga memungkinkan untuk dapat direvisi atau dilakukan perubahan untuk menyelaraskan dengan kebijakan Kukar Smart Regency.

Tabel 4.1. Daftar Kebijakan Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Jenis Regulasi Daerah	Tujuan/Fungsi
1.	Interoperabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Tim Interoperabilitas dan masa kerjanya. 2. Menetapkan standar pertukaran data dalam <i>business process</i> pemerintahan (jenis data, format data, teknologi yang digunakan dan lain-lain). 3. Memberikan arahan data-data yang akan dipakai sebagai rujukan (one data one map) untuk semua Sistem Informasi. 4. Menetapkan proses sosialisasi perihal interoperabilitas dan acuan standar yang harus diikuti kepada seluruh OPD dan masyarakat
2.	Keamanan Data dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat tim respon insiden keamanan (contoh ID SIRTII) 2. Menetapkan standar acuan internasional dalam Keamanan Sistem Informasi (contoh ISO 27000) 3. Menetapkan standar keamanan data dan sistem informasi dalam <i>business process</i> pemerintahan sesuai standarisasi yang dirujuk 4. Membuat audit internal secara berkala terhadap keamanan sistem
3.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi terhadap PRJPD, disesuaikan dengan kondisi terkini dan capaian yang akan dituju pada 2025 2. Menetapkan kebijakan Kutai Kartanegara Smart Regency sebagai bagian dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi terhadap RPJMD, disesuaikan dengan kondisi terkini dan capaian yang akan dituju pada 2021 2. Menetapkan kebijakan Kutai Kartanegara Smart Regency ke dalam RPJMD sesuai dengan Master Plan Kutai Kartanegara Smart Regency yang telah dibuat

Tabel 4.2. Daftar Lembaga/Organisasi Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Organisasi	Tujuan/Fungsi
1.	Tim Perencana dan Pengembang Aplikasi Kutai Kartanegara Smart Regency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan regulasi untuk pengembangan Aplikasi-aplikasi e-Government atau untuk berbagai proses layanan pemerintahan 2. Memberikan tinjauan terhadap Sistem Informasi atau Aplikasi yang dibangun oleh berbagai OPD agar dapat melakukan pertukaran data 3. Membuat perencanaan pengembangan Aplikasi pendukung implementasi Kutai Kartanegara Smart Regency 4. Membangun dan mengembangkan Aplikasi-aplikasi pendukung implementasi Kutai Kartanegara Smart Regency 5. Membangun arsitektur atau mengembangkan API (Application Programming Interface) untuk pertukaran data antar Sistem Informasi 6. Mengelola keamanan Data dan Informasi dari <i>application layer</i>
2.	Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Kutai Kartanegara Smart Regency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan pembangunan Infrastruktur (TI dan non TI) untuk pendukung implementasi Kutai Kartanegara Smart Regency 2. Melakukan penguatan keamanan Infrastruktur TI (<i>hardening</i>) di <i>infrastructure layer</i> 3. Melakukan maintenance berkala terhadap infrastruktur
3.	Tim Sosialisasi dan Edukasi Kutai Kartanegara Smart Regency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat akan program kerja Kukar Smart Regency. 2. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program kerja Kukar Smart Regency di internal pemerintahan dan masyarakat umum di tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten, melalui berbagai media. 3. Menginformasikan secara rutin program-program kerja Kukar Smart Regency di berbagai media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lain-lain). 4. Mensosialisasikan Kukar Smart Regency pada forum-forum ilmiah seperti acara Kuliah Umum atau Orasi Ilmiah pada proses Yudisium.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency

Ketersediaan Infrastruktur pendukung umumnya menjadi faktor utama dalam kemajuan implementasi Teknologi Informasi. Dukungan bandwidth internet dan kelistrikan yang stabil dan terjamin suplainya 7 x 24 jam diperlukan untuk menjalankan berbagai Aplikasi atau Sistem Informasi maupun sistem lainnya yang tergantung dengan pasokan listrik. Untuk proses implementasi Kutai Kartanegara Smart Regency, dapat direncanakan infrastruktur pendukung, yaitu:

1. Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing (Komputasi Awan)
2. Pembangunan Disaster Recovery System/Center
3. Penambahan Jaringan Public Internet Hotspot

4.2.1. Pengembangan Cloud Computing (Komputasi Awan)

Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet (awan). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyi untuk memberikan suatu layanan (as a service), sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet (di dalam awan) tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya.

Melalui pemanfaatan teknologi Cloud, pengembangan layanan-layanan Teknologi Informasi dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses ketersediaan infrastruktur server dengan Service Level Agreement (SLA) yang baik. Cloud Computing dalam pemerintahan (e-Government) dapat mendorong kinerja khususnya dalam bidang pemerintahan. e-Government dapat membantu para staf di bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Pemerintah negara Indonesia telah menggunakan cloud computing, contohnya Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyediakan layanan Cloud Computing sebagai layanan jasa alih daya pengelolaan TIK untuk instansi pemerintah. Layanan ini bertujuan untuk dapat mewujudkan percepatan e-government, karena memungkinkan pengguna pemerintah berkonsentrasi dalam memberikan layanan dan tidak dipusingkan dengan konfigurasi maupun pemeliharaan perangkat teknologi informasi.

Selain itu instansi pemerintah seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga sudah menggunakan teknologi ini. Berdasarkan kalkulasi Balai Ipteknet penggunaan layanan jasa komputasi awan dapat menghemat biaya hampir 50% dibanding dengan menyiapkan infrastruktur dan SDM sendiri yang mencapai ratusan juta rupiah. Jika dalam aplikasi terdapat data-data rahasia, maka pengembang layanan Teknologi Informasi dapat menggunakan server sendiri untuk membuat Private Cloud dipadukan dengan penyedia layanan Public Cloud dalam negeri atau dengan Colocation Server. Keamanan sistem menjadi prioritas utama layanan Cloud Computing yang dilengkapi firewall, VPN dan Security Operating Centre (SOC) yang merupakan software canggih untuk melakukan pemantauan dan penyaringan deteksi dini terhadap seluruh paket yang melewati jaringan. Sehingga ketika terjadi gangguan dan serangan bisa dilakukan tindak lanjut dan pembenahan.

Teknologi Cloud Computing dapat memudahkan untuk sharing informasi dan pertukaran dokumen. Keuntungan lain, bagi UKM dan Koperasi dapat menurunkan biaya investasi dan operasional IT, keragamannya pun sudah ada serta transparansi dan peningkatkan bisnis koperasi maupun UKM dengan kemudahan teknologi yang ada. Kunci dari infrastruktur untuk cloud computing adalah media penyimpanan dan metode komputasi untuk data yang berskala besar. Keuntungan dengan menggunakan cloud computing adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi resiko pada infrastruktur TI
2. Dana yang relatif rendah
3. Peningkatan kecepatan inovasi
4. Mengurangi waktu persiapan untuk proses running aplikasi dan waktu respon
5. Biaya yang relatif terjangkau
6. Layanan publik yang lebih baik dengan cara penyediaan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat.
7. Mendapatkan informasi lebih terkait dengan masyarakat umumnya. Hal ini diperoleh lewat analisis mendalam terhadap database yang ada.

Tabel 4.3. Perbandingan Teknologi Infrastruktur TI

Parameter	Public Cloud	Colocation	Server Mandiri
Ketersediaan listrik	7 x 24 jam	7 x 24 jam	Tergantung PLN & Backup listrik (Genset)
Ketersediaan bandwidth internet	7 x 24 jam	7 x 24 jam	Tergantung ISP/Penyedia jasa internet
Waktu Up Operasional (Service Level Agreement)	Dapat mencapai 99,8%	Dapat mencapai 99,8%	Tergantung suplai listrik dan internet
Model Belanja	Masuk dalam belanja biaya operasional	Biaya operasional dan biaya investasi pembelian server	Biaya operasional dan biaya investasi pembelian server
Biaya Investasi	Mulai dari US\$ 55/bulan (Data Center di Indonesia)	Pembelian Server Biaya Colocation Rp. 3.750.000/bulan	Pembelian Server (asumsi : sudah tersedia internet dengan IP Publik)
Biaya Operasional	Masuk dalam belanja investasi	Biaya Maintenance Server. Gaji/Honor untuk teknisi maintenance	Biaya Maintenance Server. Gaji/Honor untuk teknisi maintenance. Biaya listrik dan langganan Internet
Keamanan Data dari pencurian pihak asing	Aman jika server penyedia berada di Indonesia	Aman jika di colocation-kan di Indonesia	Aman

Untuk ketersediaan infrastruktur pendukung, dapat menggunakan salah satu dari opsi berikut ini:

- Opsi 1, menggunakan Teknologi Cloud
- Opsi 2, menggunakan Colocation Server
- Opsi 3, menggunakan paduan Teknologi Cloud dan Colocation

4.2.2. Disaster Recovery Center

Penyedia layanan di internet seperti Internet Service Provider (ISP), Colocation, Hosting atau penyedia Cloud Service umumnya memberikan jaminan berupa Service Level Agreement (Tingkat Ketersediaan Layanan) hingga mencapai 99,8% up selama setahun. Artinya sekitar 0,2% terjadi kemungkinan server atau infrastrukturnya mengalami down atau sekitar 17,54 jam per-tahunnya. Jika telah ada komitmen dalam pelaksanaan layanan 7 x 24 jam kepada masyarakat oleh pemerintahan, maka SLA down 0,2 % ini harus dapat diantisipasi agar layanan tidak terhenti. Termasuk jika terjadi hal-hal yang masuk ke dalam kategori force majeure, seperti gempa bumi, banjir atau bencana lain yang dapat menghentikan proses layanan.

Untuk itu diperlukan adanya Disaster Recovery System (atau pemulihan sistem dari akibat bencana) agar proses penanganan masalah yang terjadi akibat hal-hal di luar dari kendali manusia dapat diatasi dengan baik. Sehingga proses layanan tidak terganggu atau minimal dapat dilanjutkan kembali dengan secepatnya.

Kalimantan Timur secara geografis relatif lebih aman terhadap berbagai jenis bencana alam jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun bukan berarti aman 100%, seringkali banjir yang terjadi di ibu kota provinsi dapat menjadi ancaman serius untuk proses layanan baik secara fisik maupun layanan online. DRC/S dirancang dengan memanfaatkan kondisi geografis dan dibuat bertahap sampai dengan kondisi ideal yang ingin dicapai (misalkan automatic fail over untuk layanan online).

Tabel 4.4. Model Pengembangan Disaster Recovery System/Center

	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Layanan Online	Server 1 (Jakarta) Server 2 (Batam, standby server)	Server 1 (Jakarta) Server 2 (Batam) Redundant	Server 1 (Jakarta) Server 2 (Batam) Redundant
Layanan langsung	Stop	Pindah layanan ke Kantor cadangan atau Gedung DRC	Pindah layanan ke Kantor cadangan atau Gedung DRC
Proses Backup	Otomatis (Penjadwalan snapshot)	Otomatis (mirroring)	Otomatis (mirroring)
Proses Recovery	Manual (switch manual dari server 1 ke server 2 atau sebaliknya)	Otomatis (switch dari server 1 ke server 2 dan sebaliknya atau live migration)	Otomatis (switch dari server 1 ke server 2 dan sebaliknya atau live migration)

Untuk infrastruktur DRS/C, dapat menggunakan salah satu dari model berikut ini:

- Opsi 1, Server 1 Cloud dan Server 2 Cloud
- Opsi 2, Server 1 Colocation dan Server 2 Colocation
- Opsi 3, Server 1 Cloud dan Server 2 Colocation

4.2.3 Public Internet Hotspot

Internet adalah medium terbaik untuk mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat seseorang. Negara atau Pemerintah seharusnya mendukung pembangunan infrastrukturnya, terutama di ruang-ruang publik. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir ini juga telah membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi menjadi semakin meningkat. Adanya layanan public hotspot dari pemerintah daerah untuk warganya dapat membantu meningkatkan literasi digital warga dan menumbuhkan komunitas-komunitas yang memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dan koordinasi. Kemampuan masyarakat untuk menyerap dan beradaptasi dengan teknologi juga menjadi modal penting dalam penerapan Smart City/Regency.

Terdapat urgensi untuk menambah lebih banyak lagi titik-titik akses internet. Penyebaran titik akses internet publik dapat diatur untuk mendekati tempat-tempat berkumpulnya warga seperti perpustakaan, taman, restoran, terminal dan pusat-pusat perekonomian. Penambahan titik akses juga bisa digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan/monitoring lingkungan sekitar dengan penambahan IPCam atau sensor-sensor misalkan untuk mengetahui kualitas udara. Untuk perangkat dan instalasi, Pemkab Kukar dapat menggunakan opsi-opsi sebagai berikut:

- Investasi mandiri untuk peralatan pendukung dan instalasinya
- Kerjasama dengan Internet Service Provider yang dilanggan Pemkab Kukar untuk perangkat dan instalasi, sedangkan bandwidth internet dimasukan ke dalam skema langganan
- Perangkat, instalasi dan bandwidth internet disediakan oleh pihak Internet Service Provider dikompensasikan dengan pemasangan iklan dilokasi titik akses

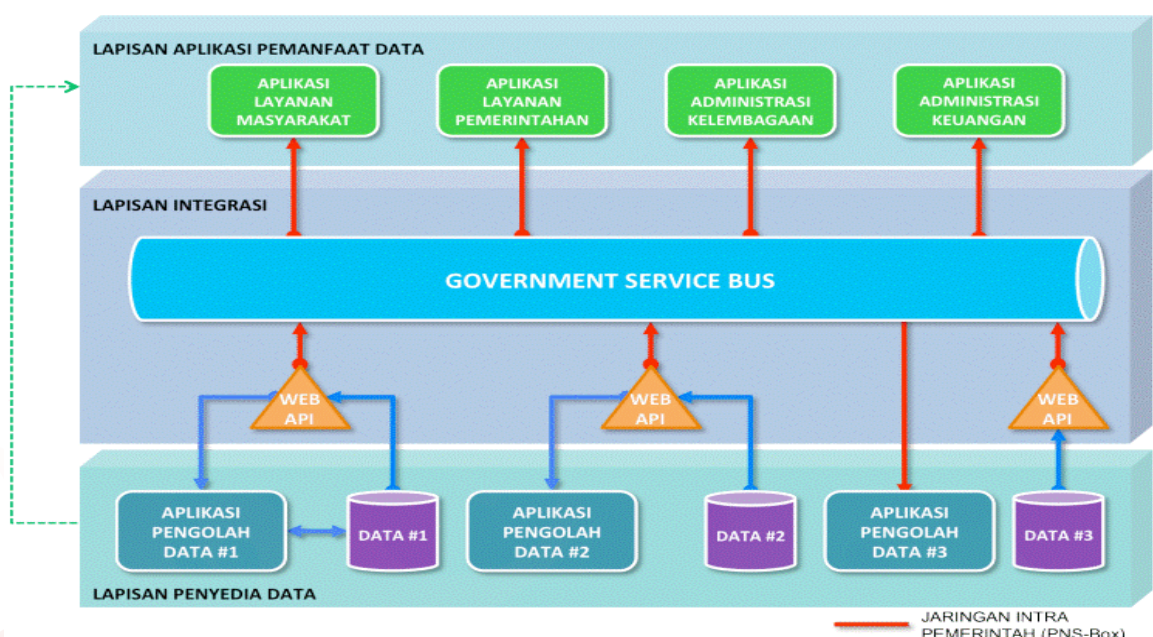
4.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart Regency Kutai Kartanegara

4.3.1. Integrasi Sistem Informasi

Pertukaran data atau proses antar Sistem Informasi dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan berbagai macam metode. Hal ini dilakukan agar proses pendataan tidak terjadi duplikasi, acuan data menjadi jelas (one data) atau jika ada perubahan data, maka seluruh database yang memiliki isian yang sama secara otomatis akan terupdate dengan mengacu kepada 1 data (one data). PP 82 Tahun 2012 dalam pasal 23 mengatur tentang Interoperabilitas dan Kompatibilitas Sistem Informasi atau Sistem Elektronik.

Fokus Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi dengan menerapkan Interoperabilitas:

1. Dapat memanfaatkan fungsi layanan aplikasi yang sudah tersedia.
2. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dapat dimanfaatkan fungsinya untuk aplikasi lainnya dengan cara berbagi pakai fungsi dan data.
3. Pengelolaan aplikasi berkelanjutan dengan adanya manfaat berbagi pakai data.
4. Mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan.
5. Mempermudah koordinasi antar lembaga.
6. Mengurangi tumpang tindih layanan antar sistem.
7. Memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat.
8. Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
9. Meningkatkan kinerja pegawai pemerintah.
10. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.



Gambar 4.1. Arsitektur Integrasi Sistem Informasi dengan Government Service Bus (GSB)

Untuk mengintegrasikan Sistem Informasi atau aplikasi layanan (pemerintah/masyarakat) dapat menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Mengimplementasikan Webservice, dengan menghubungkan langsung antar sistem melalui Webservice.
2. Menggunakan API Agent/Controler dan Service Bus yang mengatur komunikasi antar webservice/API dari masing-masing sistem.

Ada beberapa opsi yang dapat dikembangkan untuk proses implementasi integrasi Sistem Informasi, yaitu:

- Opsi 1, Mengembangkan sendiri webservice dari tiap sistem atau aplikasi yang dihubungkan secara langsung
- Opsi 2, Mengembangkan sendiri API Agent/Controler dan Service Bus untuk Intgerasi Sistem/Aplikasi
- Opsi 3, Menggunakan Model API Agent/Controler dan Service Bus dari produk-produk opensource (WSO2; Apache; Mule ESB) atau proprietary (Oracle ESB; SAP; IBM Integration Bus)
- Opsi 4, Menggunakan Model API Agent/Controler dan Government Service Bus (Mantra) dari Kemenkominfo

4.3.2. City Operation/Command Center

City Operation/Command Center bertindak seperti otak dan sistem saraf pusat untuk Smart City, mengintegrasikan dan menghubungkan informasi dan proses serta menyediakan platform untuk teknologi, operasi dan manajemen:

1. Memantau operasi kota sehingga staf profesional dapat tetap mengetahui kondisi.
2. Mempercepat tanggap darurat dengan kolaborasi lintas OPD.
3. Mensimulasikan operasi kota dan memfasilitasi pengambilan keputusan cerdas dengan perencanaan data kota terpadu dan analisis data mining.
4. Sistem data open source menawarkan layanan data yang cerdas untuk warga.

Implementasi City Operation/Command Center harus didukung oleh infrastruktur Informasi dan Komunikasi berbasis cloud yang reliable. Diperlukan kerjasama lintas sektor atau OPD untuk mewujudkan sebuah City Operation/Command Center yang dapat memberikan layanan komprehensif seperti database pengelolaan kota, dukungan data dan layanan sumber daya, aplikasi lintas instansi/OPD dan rencana untuk membangun pusat operasi kota. Cakupan City Operation/Command meliputi:

1. Infrastruktur TI. Merupakan Platform cloud e-Government yang dapat dialokasikan secara terpusat dan dapat melakukan pengelolaan infrastruktur TI dan sumber data (seperti sumber komputasi, penyimpanan dan jaringan)
2. Database pengelolaan kota. Berupa data-data Populasi, perumahan, makro ekonomi dan informasi geografis yang mendukung pembagian data yang fleksibel dan pengambilan keputusan
3. Dukungan data dan layanan sumber daya komputasi. Memanfaatkan Big Data dengan mengumpulkan data lintas OPD, sektor dan dari berbagai sumber yang terpercaya.
4. Aplikasi layanan lintas OPD. Menampilkan status operasi kota ditampilkan untuk monitoring dan peringatan, penanganan secara kolaboratif dan sistem perintah untuk keadaan darurat, simulasi dan perencanaan terpadu, open city data dan layanan informasi serta manajemen keamanan cyber.
5. Pusat operasi kota. Berupa display dengan layar besar, fasilitas konferensi digital, sound reinforcement, video dan audio switching, central control system dan fasilitas lainnya.

Manfaat dari implementasi City Operation/Command Center :

1. Pemantauan yang komprehensif
2. Penanganan dan perintah darurat kolaboratif
3. Perencanaan terpadu
4. Keterbukaan data untuk opensource city dan layanan cerdas untuk warga yang dapat dipersonalisasi

4.3.3. Aplikasi Pelaporan Warga atau Panic Button

Melalui pemanfaatan aplikasi pelaporan, warga dapat ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan berbagai yang terjadi pada lingkungan sekitar; layanan terhadap masyarakat; atau pelaksanaan proses/program pemerintahan. Bentuk partisipasi warga dalam bentuk pengawasan dan pelaporan adalah wujud rasa cinta masyarakat terhadap perkembangan daerahnya. Di sisi penerima, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait akan memberikan keterangan lanjutan. Apa yang menjadi masalah atau memberikan respon terhadap laporan. Sehingga timbul interaksi langsung dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya.

Aplikasi pelaporan yang memiliki Panic Button juga akan men-trigger aksi cepat dari para aparat yang berwenang untuk menangani masalah-masalah yang timbul di masyarakat seperti masalah kriminalitas, gangguan ketertiban umum, kebakaran, perkelahian warga atau masalah lainnya. Sehingga angka kriminalitas atau gangguan dapat ditekan dan kerugian harta, benda atau nyawa dapat dihindari. Setiap masalah yang timbul akan terdata dengan baik dalam sistem. Data-data ini dapat digunakan pengambil kebijakan untuk mencegah kembali timbulnya masalah yang sejenis, mempersiapkan regulasi dan ketersediaan sumber daya pendukung operasional dalam penyelesaian masalah tersebut.

4.3.4. Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Masyarakat (Existing)

Selain pengembangan aplikasi baru, Tim Perencana dan Pengembang Aplikasi Kutai Kartanegara Smart Regency juga akan melakukan pemilahan (berdasarkan prioritas tertentu) dan pengembangan terhadap berbagai aplikasi yang telah ada di berbagai OPD, baik untuk kebutuhan internal pemerintahan maupun untuk layanan kepada masyarakat. Daftar Aplikasi yang akan dikembangkan lebih lanjut terdapat pada Buku 1 Lampiran 1.

4.4. Rencana Penguatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency

Pemahaman masyarakat, baik Pemerintah dan non-pemerintahan akan keberadaan Program Gerakan 100 Smart City dari pemerintah pusat dan implementasinya pada Kutai Kartanegara Smart Regency perlu ditingkatkan. Jika semua lapisan masyarakat sadar akan manfaat dan pentingnya program ini, maka akan timbul kesadaran dan partisipasi aktif untuk turut mensukseskannya. Rencana penguatan literasi Kukar Smart Regency dapat dilakukan Tim Sosialisasi dan Edukasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kegiatan Peningkatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency

Bentuk Kegiatan	Media penyampaian
Sosialisasi	Media Elektronik : TV; Radio Media Cetak : Koran; Majalah; Buletin; Baliho; Spanduk Media Sosial : Facebook; Twitter; Instagram Online Forum : Group Whatsapp , Group Line, Group Facebook
Edukasi	Workshop/Bimtek Seminar Orasi Ilmiah Kuliah umum
Diskusi	Focus Group Discussion / FGD Lokakarya

5. Roadmap Pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency



Arah pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency dapat dipetakan ke dalam tabel 5. dimana setiap Program Kerja dapat dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Tabel 5.1. Roadmap Implementasi Quick Win

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	Quick Win		OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
			2017	2018		
1.	Implementasi QR-Code	Smart Government	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Kukar Holiday	Smart Branding, Smart Economy	✓	✓	Dispar	Diskominfo, Dishub, DiskopUKM, Bapenda, Disperindag
3.	SIPULAN	Smart Government, Smart Living, Smart Society	✓	✓	RSU Parikesit	Dinkes, Disdukcapil, Dinsos, DP2-KB
4.	Web site Dinas Pertanian	Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Society	✓	✓	Dinas Pertanian	Diskominfo, DPKHP, DLHK, DKPP, Disperindag DPTR, Disperkim, DPMD, DiskopUKM,

Tabel 5.2. Roadmap Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung jawab	OPD Pendukung
1.	Regulasi Interoperabilitas	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Regulasi Keamanan Data dan Sistem Informasi	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
3.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Smart Governance	✓				BAPPEDA	Seluruh OPD
4.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Smart Governance	✓				BAPPEDA	Seluruh OPD
5.	Pembentukan Tim Perencana dan Pengembangan Aplikasi Kukar Smart Regency	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
6.	Pembentukan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Kukar Smart Regency	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
7.	Pembentukan Tim Sosialisasi dan Edukasi Kukar Smart Regency	Smart Governance, Smart Society	✓				Diskominfo	Seluruh OPD

Tabel 5.3. Roadmap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
	Pengembangan Cloud Computing	Smart Government, Smart Environment	✓	✓	✓		Diskominfo	Seluruh OPD
	Disaster Recovery System/Center	Smart Government	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Damkar, DPTR, Disperkim
	Penambahan Jaringan Public Internet Hotspot	Smart Society, Smart Environment	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Disdikbud, Dispar, DPMD

Tabel 5.4. Roadmap Penguatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency

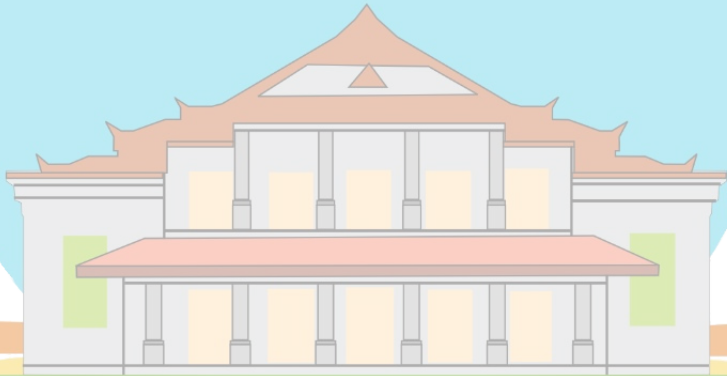
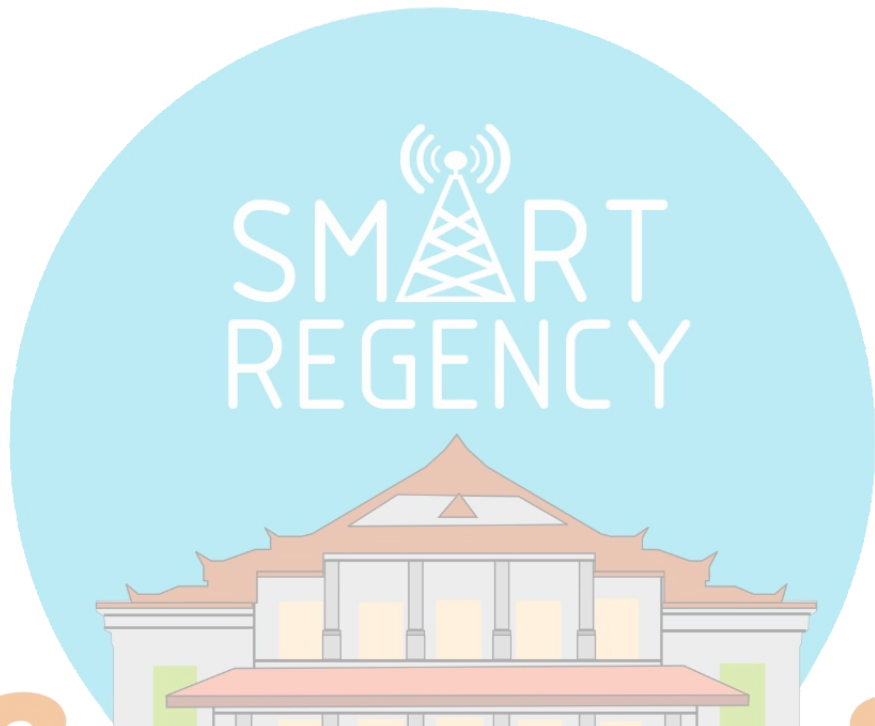
No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
1.	Workshop	Semua Dimensi	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Sosialisasi		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
3.	Orasi Ilmiah, FGD, Seminar		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
4.	Pemberitaan Media Elektronik		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
5.	Pemberitaan Media Cetak		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
6.	Sosialisasi via Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll)		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
7.	Sosialisasi via komunitas lokal		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
8.	Sosialisasi via forum-forum online		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD

6. Penutup



Buku Kutai Kartanegara Smart Regency Masterplan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu kepada para pengambil keputusan di Kab. Kukar untuk melaksanakan program kerja dalam Gerakan Menuju 100 Smart City sehingga tujuan-tujuan pada RPJMD dan RPJPD dapat dicapai dengan akselerasi lebih cepat. Dalam pelaksanaan setiap program kerja pada buku ini, masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan serta ketersediaan sumber daya pendukungnya. Pada pelaksanaan program kerja, semua unsur lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam rangka mensukseskan, mengawasi atau memberikan sumbangan, baik material maupun berupa usulan atau pemikiran agar hasil dari program kerja Kutai Kartanegara Smart Regency bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera.





KUTAI KARTANEGARA





BUKU 3

Executive Summary Master Plan

SMART REGENCY

1. Latar Belakang



Kabupaten Kutai Kartanegara telah terpilih menjadi pilot project dalam gerakan Gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas oleh berbagai kalangan mulai dari pemerintah tim ahli akademisi dan praktisi serta perwakilan dari dunia industri. Setelah melalui proses assesment, Kab.Kukar bersama dengan 24 Kota/Kabupaten lainnya melalui SK Kemenkominfo RI Nomor 265.KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017 ditetapkan siap untuk melaksanakan program Smart City. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong Kabupaten dengan luasan terbesar ke-2 di Kalimantan Timur dalam memenuhi parameter Smart City, antara lain: tempat sejarah awal pola pemerintahan (kerajaan) di Indonesia; merupakan Kabupaten di Kaltim dengan PDRB 2016 tertinggi; memiliki tujuan wisata yang relatif lengkap; memiliki sumber daya alam yang beragam; terletak di daerah aliran sungai Mahakam dan Delta Mahakam yang merupakan jalur transportasi, perekonomian serta faktor penting dalam kelestarian alam di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai wilayah yang pernah menjadi Kerajaan Kutai yaitu merupakan Kerajaan Pertama Nusantara, Kab. Kukar melalui Peraturan Daerahnya telah menetapkan program Smart City ke dalam RPJMD 2016-2021. Dimana dalam Misi Kelima dalam RPJMD Kab.Kukar adalah menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan salah satu sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet dan pengembangan kawasan smart city. Dengan adanya ketetapan secara hukum dari RPJMD dan SK Kemenkominfo maka terwujudlah Master Plan Smart Regency Kutai Kartanegara, yang bertujuan sebagai dokumen rujukan untuk perencanaan yang komprehensif dalam proses implementasi Smart Regency berdasarkan pada sumber daya yang ada di daerah Kutai Kartanegara dan sesuai dengan regulasi Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

2. Visi Smart Regency Kutai Kartanegara



Pemerintah Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2016-2021 telah menetapkan program kerja Smart City yaitu : penyusunan Grand Design Smart City, pembagian menjadi beberapa kawasan berbasis Teknologi Informasi, peningkatan layanan e-Government, integrasi Sistem Informasi dan peningkatan akses internet untuk publik. Bupati Kukar melalui SK Nomor 231 dan 232 tahun 2017 telah menetapkan Dewan dan Tim Pelaksana Smart Regency Kutai Kartanegara yang bertugas untuk membuat Master Plan dan mengimplementasikan program kerja yang terdapat di dalamnya. Bersama dengan itu telah ditetapkan bahwa Visi Smart Regency Kutai Kartanegara adalah :

“Mewujudkan akselerasi kemajuan Kutai Kartanegara Melalui Inovasi yang Berbasis Kearifan Lokal.”

3. Strategi Pembangunan Smart City



3.1. Smart Governance

Dimensi Smart Governance berfokus pada pengelolaan dan manajemen suatu kota atau kabupaten agar seluruh aspek dari pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota atau kabupaten tersebut. Terdapat tiga sub elemen dalam Smart Governance, yaitu: Service, Bureaucracy dan Policy.

Tabel 3.1. Strategi dan Indikator Capaian Smart Governance

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
INDUSTRY	Terbangunnya daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri-industri primer yang berbasis pada sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pariwisata 2. Membangun industri pengolahan dari hasil-hasil (bahan mentah) di industri primer agar meningkat nilai jualnya 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan lokal yang berciri khas tertentu (Unik) pada industri tersier
WELFARE	Meningkatnya serapan angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program peningkatan SDM angkatan kerja, misalkan dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi 2. Memfasilitasi penyedia lapangan pekerjaan dengan pencari kerja dengan menyediakan event seperti bursa kerja atau situs pencari kerja lokal
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau berbasis rumah tangga (UMKM) 2. Memfasilitasi industri rumah tangga untuk mendapatkan izin dan sertifikasi
TRANSACTION	Menurunnya penggunaan uang kartal (cash) dan Meningkatnya penggunaan e-money	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan channel-channel pembayaran non tunai 2. Memberikan kemudahan, insentif atau promosi untuk penggunaan e-money baik dari sisi penjual maupun pembeli 3. Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital, seperti ketersediaan koneksi internet melalui jaringan seluler berbasis 3G/4G 4. Memfasilitasi pertemuan pihak-pihak seperti BI (regulator), perbankan, e-money provider, provider telekomunikasi dan pengusaha untuk membahas isu-isu terkait implementasi transaksi non tunai
	Peningkatan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta pengusaha dalam memanfaatkan e-commerce dan market place untuk membantu pemasaran 2. Mendorong pertumbuhan Startup dan Fintech lokal yang dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya

3.2. Smart Branding

Smart branding merupakan terobosan cerdas untuk memperkenalkan suatu daerah yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah melalui 3 elemen, yaitu Tourism, Business dan Appearance.

Tabel 3.2. Strategi dan Indikator Capaian Smart Branding

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
TOURISM	Berkembangnya jumlah destinasi wisata	Menyediakan tempat-tempat wisata baru baik wisata alam maupun buatan
	Meningkatnya infrastruktur pendukung pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah dan meningkatkan kualitas Infrastruktur fisik dan komunikasi di sekitar dan lokasi daerah wisata 2. Membuat sistem monitoring infrastruktur dan objek wisata agar tetap terpelihara dengan baik
	Meningkatnya SDM pelaku usaha wisata	Pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris atau bahasa resmi PBB)
BUSINESS	Bertambahnya jumlah sarana-sarana pemasaran produk lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Pasar-pasar tradisional 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemasaran (e-Commerce) 3. Promosi dan Pameran lokal, nasional dan internasional
	Meningkatnya jumlah investor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kemudahan dan insentif untuk para investor 2. Membuat Sistem Investasi/Penanaman Modal Terpadu (Katalog Investasi, Investment Corner/Lounge dan Portal Investasi Daerah) 3. Peningkatan promosi daerah di event nasional dan internasional
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina SDM dalam manajemen, pengolahan dan pemasaran barang/jasa lokal 2. Pemberian modal usaha atau bekerjasama dengan Fintech Pemodal Peer2Peer seperti amarta.com atau modalku.com 3. Pemberian fasilitas pendukung perkembangan UMKM, seperti izin usaha, sertifikasi dan
APPEARANCE	Berkembangnya kawasan Kabupaten yang sesuai dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata ulang wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW 2. Memperbaiki bangunan-bangunan cagar budaya atau yang menjadi landmark kota 3. Menyediakan navigasi fisik dan virtual yang mudah diakses

3.3. Smart Economy

Melemahnya perekonomian nasional justru mendorong terobosan-terobosan baru yang cerdas dalam berbisnis. Melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dapat terwujud lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan potensi di daerah yang sudah ada, meningkatkan arus perputaran barang dan uang yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk atau peningkatan PDRB. Smart and Green Economy juga mendorong terciptanya perekonomian dan industri yang ramah dengan lingkungan dengan pengurangan emisi karbon dan efisiensi akan pemakaian sumber daya alam. Elemen dalam Dimensi Smart Economy antara lain: Industri; Welfare; Transaction.

Tabel 3.3. Strategi dan Indikator Capaian Smart Economy

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
INDUSTRY	Terbangunnya daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri-industri primer yang berbasis pada sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pariwisata 2. Membangun industri pengolahan dari hasil-hasil (bahan mentah) di industri primer agar meningkat nilai jualnya 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan lokal yang berciri khas tertentu (Unik) pada industri tersier
WELFARE	Meningkatnya serapan angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program peningkatan SDM angkatan kerja, misalkan dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi 2. Memfasilitasi penyedia lapangan pekerjaan dengan pencari kerja dengan menyediakan event seperti bursa kerja atau situs pencari kerja lokal
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau berbasis rumah tangga (UMKM) 2. Memfasilitasi industri rumah tangga untuk mendapatkan izin dan sertifikasi
TRANSACTION	Menurunnya penggunaan uang kartal (cash) dan Meningkatnya penggunaan e-money	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan channel-channel pembayaran non tunai 2. Memberikan kemudahan, insentif atau promosi untuk penggunaan e-money baik dari sisi penjual maupun pembeli 3. Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital, seperti ketersediaan koneksi internet melalui jaringan seluler berbasis 3G/4G 4. Memfasilitasi pertemuan pihak-pihak seperti BI (regulator), perbankan, e-money provider, provider telekomunikasi dan pengusaha untuk membahas isu-isu terkait implementasi transaksi non tunai
	Peningkatan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta pengusaha dalam memanfaatkan e-commerce dan market place untuk membantu pemasaran 2. Mendorong pertumbuhan Startup dan Fintech lokal yang dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya

3.4. Smart Living

Dimensi Smart Living berfungsi untuk menyediakan tempat hidup yang layak bagi masyarakat dalam suatu kawasan (kota/kabupaten). Sasarannya adalah terwujudnya lingkungan yang layak untuk di tinggali, nyaman dan efisien. Terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi agar pola hidup layak dapat tercapai, yaitu: **Harmony, Health dan Mobility.**

Tabel 3.4. Strategi dan Indikator Capaian Smart Living

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
HARMONY	Kesesuaian lingkungan tempat tinggal dengan Indikator Kota/ Kabupaten Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW dengan kondisi di lapangan. Adanya kawasan terpadu untuk industri atau pusat kegiatan bisnis berwawasan lingkungan
	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Menambah kawasan-kawasan yang dijadikan ruang untuk kegiatan publik, seperti taman bermain dan berekreasi
	Menurunnya tingkat kriminalitas	Meningkatkan sistem monitoring keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan menambahkan pemanfaatan teknologi di dalamnya
HEALTH	Meningkatnya ketersediaan makanan yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan usaha pertanian dan peternakan organik Meningkatkan produksi olahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi
	Meningkatnya fasilitas penunjang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama untuk proses pencegahan penyakit Penambahan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan olah raga, seperti jogging track dan taman dengan alat-alat olah raga Menyediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk ibu hamil dan menyusui di tempat-tempat publik
MOBILITY	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> Penambahan dan perbaikan infrastruktur penunjang transportasi pribadi dan publik (jalan; jembatan; pelabuhan; terminal) di segala moda transportasi (darat, air dan udara). Menggunakan Area Traffic Control System untuk proses manajemen lalu lintas.

3.5. Smart Society

Melalui Dimensi Smart Society diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang humanis dan dinamis, hubungan antar warga dapat terjalin dengan baik dan tanpa sekat dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga masyarakat menjadi lebih produktif, komunikatif dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi, dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu: **Community, Learning dan Security.**

Tabel 3.5. Strategi dan Indikator Capaian Smart Society

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
COMMUNITY	Terwujudnya Interaksi warga yang efisien	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk komunitas-komunitas yang produktif untuk meningkatkan pembangunan daerah Membina komunitas dan melibatkan ke dalam berbagai aspek dalam proses pengambilan keputusan Membangun komunikasi yang positif dan konstruktif dalam media-media sosial
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> Membuat program-program pengembangan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk hal yang positif dan produktif Mendorong pendidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di mulai dari rumah dengan menyesuaikan aspek kognitif anak
LEARNING	Terwujudnya ekosistem belajar untuk segala kalangan dan tanpa batasan ruang/waktu	<ol style="list-style-type: none"> Mensinergikan pendidikan formal dan informal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk memperoleh pendidikan tersebut Menyediakan tempat-tempat pendidikan Inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, misalkan smart pesantren
SECURITY	Terwujudnya sistem keamanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling dan ronda yang dapat dilakukan oleh warga di tingkat RT Membangun sistem peringatan dini dan penanganan masalah warga seperti aplikasi panic button atau aplikasi pelaporan warga Membangun Sistem Monitoring Keamanan dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (Internet Of Thing) yang terhubung dengan City Command Center

3.6. Smart Environment

Smart Environment merupakan dimensi yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan, agar pembangunan kawasan daerah selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat melestarikan alam sekitar. Dengan terjaganya lingkungan dari segala bentuk kerusakan, maka semua bentuk kehidupan akan terjamin keberlangsungannya. Hal ini dapat di capai melalui implementasi tiga elemen berikut:

Protection, Waste dan Energy.

Tabel 3.6. Strategi dan Indikator Capaian Smart Environment

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
PROTECTION	Berkurangnya pencemaran tanah, air dan udara atau emisi karbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya 2. Menyediakan ruang terbuka hijau serta memberikan porsi yang layak di dalam Perda RTRW 3. Membuat Sistem Monitoring Pencemaran dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (Internet Of Thing) yang terhubung dengan City Command Center 4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengelola lahan-lahan pasca tambang
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitarnya 2. Membuat program gotong-royong untuk membersihkan lingkungan tingkat RT dan tempat kerja 3. Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan
WASTE	Terwujudnya tata kelola sampah dan limbah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah atau sampah rumah tangga, publik dan industri 2. Menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Recycle dan Reuse terhadap limbah atau sampah yang akan dibuang
ENERGY	Terwujudnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan energi fosil secara efisien dan mengurangi ketergantungan terhadapnya 2. Membuat program-program konversi energi fosil ke energi terbarukan, seperti solar cell, bio fuel dan lainnya

4. Roadmap Kutai Kartanegara



Arah pembangunan Kutai Kartanegara Smart Regency dapat dipetakan ke dalam tabel 4. dimana setiap Program Kerja dapat dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1. Roadmap Implementasi Quick Win

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	Quick Win		OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
			2017	2018		
1.	Implementasi QR-Code	Smart Government	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Kukar Holiday	Smart Branding, Smart Economy	✓	✓	Dispar	Diskominfo, Dishub, DiskopUKM, Bapenda, Disperindag
3.	SIPULAN	Smart Government, Smart Living, Smart Society	✓	✓	RSU Parikesit	Dinkes, Disdukcapil, Dinsos, DP2-KB
4.	Web site Dinas Pertanian	Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Society	✓	✓	Dinas Pertanian	Diskominfo, DPKHP, DLHK, DKPP, Disperindag DPTR, Disperkim, DPMD, DiskopUKM,

Tabel 4.2. Roadmap Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung jawab	OPD Pendukung
1.	Regulasi Interoperabilitas	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Regulasi Keamanan Data dan Sistem Informasi	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
3.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Smart Governance	✓				BAPPEDA	Seluruh OPD
4.	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Smart Governance	✓				BAPPEDA	Seluruh OPD
5.	Pembentukan Tim Perencana dan Pengembangan Aplikasi Kukar Smart Regency	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
6.	Pembentukan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Kukar Smart Regency	Smart Governance	✓				Diskominfo	Seluruh OPD
7.	Pembentukan Tim Sosialisasi dan Edukasi Kukar Smart Regency	Smart Governance, Smart Society	✓				Diskominfo	Seluruh OPD

Tabel 4.3. Roadmap Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
1.	Pengembangan Cloud Computing	Smart Government, Smart Environment	✓	✓	✓		Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Disaster Recovery System/Center	Smart Government	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Damkar, DPTR, Disperkim
3.	Penambahan Jaringan Public Internet Hotspot	Smart Society, Smart Environment	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Disdikbud, Dispar, DPMDPTSP

Tabel 4.4. Roadmap Penguatan Literasi Kutai Kartanegara Smart Regency

No	Rencana Program Kerja	Dimensi Smart City	2018	2019	2020	2021	OPD Penanggung Jawab	OPD Pendukung
1.	Workshop	Semua Dimensi	✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
2.	Sosialisasi		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
3.	Orasi Ilmiah, FGD, Seminar		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
4.	Pemberitaan Media Elektronik		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
5.	Pemberitaan Media Cetak		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
6.	Sosialisasi via Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll)		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
7.	Sosialisasi via komunitas lokal		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD
8.	Sosialisasi via forum-forum online		✓	✓	✓	✓	Diskominfo	Seluruh OPD





Referensi

1. **RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.**
2. **RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.**
3. **PERDA No 09 TAHUN 2013 Tentang RTRW Kukar 2013-2033.**
4. **Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.**
5. **Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.**
6. **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Lampiran 1. Daftar Inventaris Aplikasi di Pemkab Kukar Daftar berdasarkan OPD Pemilik Business Process Aplikasi

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Status (Aktif/Tidak Aktif)	Keterangan
1.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Simda Keuangan	Aktif	
		Sim Gaji	Aktif	
		Sim Barang	Tidak Aktif	Belum ada user ID
2.	Dinas Ketahanan Pangan	Simda Keuangan	Aktif	Jaringan Tidak Optimal
		Simda Aset Daerah	Aktif	Jaringan Tidak Optimal
		Simpeg	Tidak Aktif	Jaringan dan server BKD
		Simda Gaji	Tidak Aktif	Jaringan dan server BKD
		Simda Absen Online	Tidak Aktif	Jaringan dan server BKD
3.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Simda	Aktif	Aplikasi Keuangan
		Sim Barang Daerah	Aktif	Aplikasi Barang / Asset
		Sirup	Aktif	Aplikasi Pengadaan Barang Jasa
		Spse	Aktif	Aplikasi Pengadaan Barang Jasa
		E-Planning	Aktif	Aplikasi Perencanaan
		E-Budgetting	Aktif	Aplikasi Anggaran
		E-Monev	Aktif	Aplikasi Monev
		Sr/Pk	Aktif	Aplikasi Data Kependudukan & KB
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Simda Keuangan	Aktif	
		E-Planing	Aktif	Basis Internet Rekomendasi BAPPEDA
		E-Billing	Aktif	Basis Internet Untuk Pajak Bendahara OPD
		Simda Bmd	Aktif	Basis Internet BPKAD
		Finger Print	Aktif	Basis Internet BPKAD
		Website Bkbp3a	Tidak Aktif	Tidak Ada Tenaga Ahli Yang Mengelola
		RUP	Aktif	Basis LPSE
		E-Kontrak	Tidak Aktif	Belum Aktif dari LPSE /LKPP
5.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Integrasi Layanan (SIL)	Aktif	
		Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)	Aktif	Aplikasi dari Kementerian Perdagangan
		Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Eletronik (SPIPISE)	Aktif	Aplikasi dari BKPM
		Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Aktif	Aplikasi dari BKPM
		Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Aktif	Aplikasi dari BKPM
		Sistem Informasi Badan Pelayanan Terpadu (SIMBP2T)	Aktif	
		Aplikasi Database	Aktif	
6.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Distamben.kutaikartanegarakab.go.id	Aktif	Perbaikan/perubahan nama DOMAIN menjadi ESDM
		E-Data Dinas Pertambangan Dan Energi	Aktif	Aplikasi E-DATA Distamben tidak mau diakses di Server Diskominfo
7.	Dinas Perkebunan	Bmd	Aktif	Barang Milik Daerah
		Barang Persediaan	Tidak Aktif	Belum Ada Prosedur Pengguna
		Simda Bpkp	Aktif	
		E-Billing	Aktif	
		Simda Gaji	Aktif	
		Website	Aktif	
		Simda Keuangan	Aktif	
		GIS	Aktif	Geology Information System
8.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Aplikasi Statistik Pertanian	Aktif	
		Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	Aktif	

9.	Dinas Pariwisata	E-Planning	Aktif	Aplikasi Layanan
		E-Budgeting	Aktif	Aplikasi Layanan
		E-Monev	Aktif	Aplikasi Layanan
		G-Sakip	Aktif	Aplikasi Layanan
		BSC	Aktif	Aplikasi Layanan
		E-Katalog	Aktif	Aplikasi Layanan
		E-Kontrak	Aktif	Aplikasi Layanan
		LKPP	Aktif	Aplikasi Layanan
		sinovik.menpan.go.id	Aktif	Aplikasi Layanan
		E-Development	Aktif	Aplikasi Layanan
		Sim Gaji	Aktif	Aplikasi Layanan
		Sim Bmd	Aktif	Aplikasi Layanan
		Simda Keuangan	Aktif	Aplikasi Layanan
		10.	Diskominfo	SPSE
SIPORE	Aktif			Sistem Informasi Procurement Reporting
Netreport	Aktif			Sistem Informasi Pelaporan Jaringan
E-Telex	Aktif			Sistem Elektronik Telex
Polahan Sida	Aktif			Sistem Informasi Pendaftaran Bimtek LPSE
Penjaga Sikap	Aktif			Sistem Informasi Penilaian Kinerja & Organisasi Pemerintah
E-Katalog	Aktif			Sistem Informasi Purchasing LKPP
SILANA	Aktif			Sistem Informasi Layanan Pengguna LPSE
SIPENA	Aktif			Sistem Informasi Pencatatan Aktivitas
SIMPEL	Aktif			Sistem Informasi Pengadaan Langsung
TAMA	Aktif			Tempat Akses Multi Aplikasi : Single Sign On
LASIMTEL	Aktif			Sistem Layanan Informasi Menara Telekomunikasi
Noc Book	Aktif			Sistem Informasi Pencatatan Aktivitas NOC
Pendaftaran Hotspot Online	Aktif			Sistem Informasi Pendaftaran Hotspot
SIDALEH	Aktif	Sistem Informasi Desa Kelurahan		
11.	Dinas Perhubungan	Simda Keuangan	Aktif	
		Simda Barang	Aktif	
		GIS	Tidak Aktif	Banyak Hardware Yang Rusak
		Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIMPD)	Tidak Aktif	Aplikasi Sudah Expired
		Sistem Informasi Bongkar Muat Pelabuhan (SIBMP)	Tidak Aktif	Masa Berlangganan Sudah Expired
		Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Aktif	
		Kearsipan	Aktif	
		Sistem Informasi Manajemen Perhubungan (SIMHUB)	Aktif	
		Website Perhubungan	Aktif	
		Sms Center	Tidak Aktif	Perlu Perawatan
12.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	SI-DTKT	Aktif	Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
		Web Distransnaker (disnakertrans.kutaiartanegara.kab.go.id)	Aktif	
13.	Dinas Sosial	SI-PEKSOS	Aktif	Sistem Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

14.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Aplikasi SIM Pengawas	Aktif	Server Kemendikbud
		Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dikdasmen	Aktif	Server Kemendikbud
		Aplikasi Data Rekap / Queri Data Pokok Pendidikan	Aktif	Server Kemendikbud
		Aplikasi Data Pokok Pendidikan Paud	Aktif	Server Kemendikbud
		SIMKUDARA	Aktif	Untuk Pengendalian Internal Pengeluaran Arus Kas Pada Bendahara Pengeluaran (Keuangan Disdik)
		SIMDA Keuangan	Aktif	Untuk Pengendalian Seluruh Proses atau Transaksi Keuangan (BPKAD Kab. Kukar)
		SIMDA BMD	Aktif	Untuk Pengendalian Proses Administrasi Aset (BPKAD Kab. Kukar)
15.	Sekretariat Daerah	SIMDA	Aktif	
		E-Monev	Aktif	
		E-Planning	Aktif	
		E-Billing	Aktif	
		E-Development	Aktif	
		Aplikasi Gerbang Raja	Aktif	Aplikasi Beasiswa
		Aplikasi Absensi	Aktif	
		SITASWIL	Aktif	Sistem Informasi Batas Wilayah
16.	RSUD AM. Parikesit Tenggarong	WEB RSUD	Aktif	Online
		SIMPERJADIN	Aktif	Offline
		Simda Keuangan	Aktif	Online
		SIMDA BMD	Aktif	Online
		SIPAK BLUD	Aktif	Offline
		SIM RS	Aktif	Online Di Rumah Sakit
		SIARBA BLUD	Aktif	Offline
		SIMARI	Aktif	Online Di Rumah Sakit
		SIPULAN	Aktif	Online Dgn Puskesmas
		SIPERMON	Aktif	Online (Kemenkes)
		SIRS	Aktif	Online (Kemenkes)
		E-Moneu	Aktif	Online (Kemenkes)
		E-Planing	Aktif	Online (Kemenkes)
		E-Planing	Aktif	Online (Bappeda)
		RS Online	Aktif	Online (Kemenkes)
		E-Renstra	Aktif	Online (Kemenkes)
		ASPEK	Aktif	Online (Kemenkes)
		E-Renggar	Aktif	Online (Kemenkes)
17.	Kecamatan Kota Bangun	Simda Keuangan	Aktif	Online
		Simda Barang	Aktif	Online
		E-Planning	Aktif	Online
		E-Monev	Aktif	Online
		Sirup	Aktif	Online
		Profil Desa & Kecamatan	Aktif	Online
		E-KTP	Aktif	Online
		SIMADE	Aktif	Sistem Managemen Administrasi Desa

Daftar berdasarkan Business Process Aplikasi

NO.	JENIS KELOMPOK	NAMA APLIKASI	NAMA LAYANAN
1	PELAYANAN	SIPERICAPIL	Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Capil
		SIMPELDA	Sistem informasi Pelayanan Perbendaharaan
		SILANA	Sistem Informasi Layanan Pengguna LPSE
		LASIMTEL	Sistem Layanan Informasi Menara Telekomunikasi
		SIDALEH	Sistem Informasi Desa Kelurahan
		LIBRARY	Perpustakaan BAPPEDA
		SIAPDA	Sistem Informasi Pajak Daerah
		SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
		SPIPISE	Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara Elektronik

2	ADMINISTRASI & MANAJEMEN	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		SISMIOP	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak
		SIMASET	Sistem Informasi Manajemen Aset
		E-DATABASE PERIZINAN	Sistem Informasi Manajemen Arsip Perizinan
		PENDAFTARAN HOTSPOT ONLINE	Sistem Informasi Pendaftaran Login Hotspot
		SIPORE	Sistem Informasi Procurement Reporting
		TAMA	Tempat Akses Multi Aplikasi : Single Sign On
		POLAHAN SIDA	Sistem Informasi Pendaftaran BIMTEK LPSE
		PENJAGA SIKAP	Sistem Informasi Penilaian Kinerja & Organisasi Pemerintah
		PORTAL PERIZINAN	Sistem Informasi Portal Perizinan Online
		SIPO	Sistem Informasi Perusahaan Online
		NOC BOOK	Sistem Informasi Pencatatan Aktivitas NOC
		MAIL	Surat Elektronik
		SIPENA	Sistem Informasi Pencatatan Aktivitas
SIMARI	Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap		
3	LEGASI	-	-
4	PEMBANGUNAN	E-DATABASE	Elektronik Database Pembangunan
		SIPPINTER	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
		GEOPORTAL	Sistem Informasi GIS Pembangunan
		E-MONEV	Elektronik Monev
5	KEUANGAN	E-BUDGETING	Elektronik Budgeting
		SIMDA KEUANGAN BPKP	Sistem Informasi Keuangan
		SIMKUDARA	Sistem Informasi Keuangan Bendahara
		SIM GAJI	Sistem Informasi Gaji
6	KEPEGAWAIAN	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian
		BAPERJAKAT	Sistem Informasi Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan
		SIM KENAIKAN PANGKAT	Sistem Informasi Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SKP ONLINE	Sistem Informasi Kinerja Pegawai
7	KEPEMERINTAHAN	ABSENSI ONLINE	Sistem Informasi Absensi Pegawai
		E-TELEX	Sistem Elektronik Telex
8	KEWILAYAHAN	PERIZINAN ONLINE	Backoffice Perizinan Online
		SITASWIL	Sistem Informasi Batas Wilayah
9	KEMASYARAKATAN	SIPEKSOS	Sistem Informasi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
		SISBAPEMAS	Sistem Informasi Bapemas
10	JARINGAN ELEKTRONIK	NETREPORT	Sistem Informasi Pelaporan Jaringan
11	PENGADAAN	SPSE	Sistem Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
		E-KATALOG	Sistem Informasi Purchasing LKPP
		SIMPEL	Sistem Informasi Pengadaan Langsung
12	PENDIDIKAN	SIMREF	Sistem Informasi Referensi Pendidikan
		SIMPEDU	Sistem Informasi Pendidikan Terpadu
		SIMPATIK	Sistem Informasi Pendidik & Tenaga Kependidikan
		SIPEDAS	Sistem Informasi Pendidikan Dasar
		SICAKEP	Sistem Informasi Calon Kepala Sekolah
		PSB ONLINE	Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru
		PSB ONLINE SMAN 1 SAMBOJA	Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru
		DAPODIK DASMEN	Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah
		DAPODIK PAUD	Sistem Data Pokok Pendidikan PAUD
		ERPIS	Sistem Informasi Sumber Daya Pendidikan
13	KESEHATAN	SIMPUS	Sistem Informasi Puskesmas
		SIMRS	Sistem Informasi Pendaftaran Kamar Rumah Sakit
		FWS IMUNISASI	Sistem Informasi Untuk Laporan Imunisasi
		SKDR	Sistem informasi Kewaspadaan Dini Survalkanse
		TB ELEKTRONIK	Sistem Informasi TBC
		ASISMAL	Sistem Informasi Asismal
		LAP ISPA	Sistem Informasi Untuk ISPA
		LAP DIARE	Sistem Informasi Untuk Diare
		LAP HIV AIDS	Sistem Informasi Untuk Laporan HIV AIDS
SIGIZI	Sistem Informasi Untuk Laporan Gizi		

Lampiran 2. Daftar Peraturan terkait Smart City/Regency

No.	Nomor Peraturan	Tentang/ruang lingkup	Sudah Diterapkan/ Belum	Jenis Kebijakan
1.	Nomor 3 Thn 2003	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	Sudah	Instruksi Presiden
2.	PP no. 18 Tahun 2016	Perangkat Daerah	Sudah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
3.	Nomor 11 Tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Sudah	Peraturan Undang-Undang
4.	Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Sudah	Peraturan Undang-Undang
5.	Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Sudah	Peraturan Undang-Undang
6.	Nomor 96 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Sudah	Peraturan Pemerintah
7.	Nomor 46 Tahun 2014	Sistem Informasi Kesehatan	Sudah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
8.	Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota	Sudah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



9.	Nomor 69A Tahun 2004	Teknis Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Panduan Teknis Manajemen Data, Informasi dan Organisasi Sistem Informasi Pemerintahan	Sudah	Keputusan Menteri Kominfo
10.	Nomor 41 Tahun 2007	Panduan Umum Tata Kelola E-Government Nasional	Sudah	Peraturan Menteri Kominfo
11.	Nomor 41 Tahun 2016	One Data One Map	Sudah	Peraturan Gubernur
12.	Nomor 44 Tahun 2009	Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemkab Kukar	Sudah	Peraturan Bupati
13.	Nomor 45 Tahun 2009	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement di lingkungan Pemkab Kukar	Sudah	Peraturan Bupati
14.	Nomor 46 Tahun 2009	Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemkab Kukar	Sudah	Peraturan Bupati
15.	Nomor 2 Tahun 2012	Unit Pelaksana Teknis LPSE	Sudah	Peraturan Bupati
16.	Nomor 86 Tahun 2013	Pedoman Standar Pelayanan Publik	Sudah	Peraturan Bupati
17.	Nomor 87 Tahun 2013	Pedoman Penyusunan Standar SOP Pemkab Kukar	Sudah	Peraturan Bupati
18.	Nomor 13 Tahun 2014	Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
19.	Nomor 37 Tahun 2014	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Kukar	Sudah	Peraturan Bupati
20.	Nomor 29 Tahun 2016	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Micro-cell	Sudah	Peraturan Bupati
21.	Nomor 34 Tahun 2016	Petunjuk Teknis Pembangunan Menara Telekomunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
22.	Nomor 7 Tahun 2016	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Sudah	Peraturan Bupati
23.	Nomor 37 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata	Sudah	Peraturan Bupati
24.	Nomor 38 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Sudah	Peraturan Bupati
25.	Nomor 39 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah	Peraturan Bupati
26.	Nomor 40 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
27.	Nomor 41 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan	Sudah	Peraturan Bupati
28.	Nomor 42 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Perangkat Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
29.	Nomor 43 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
30.	Nomor 44 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum	Sudah	Peraturan Bupati
31.	Nomor 45 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Capil	Sudah	Peraturan Bupati
32.	Nomor 46 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
33.	Nomor 47 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD	Sudah	Peraturan Bupati
34.	Nomor 49 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Sudah	Peraturan Bupati
35.	Nomor 50 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan	Sudah	Peraturan Bupati

36.	Nomor 51 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sudah	Peraturan Bupati
37.	Nomor 52 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial	Sudah	Peraturan Bupati
38.	Nomor 53 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pehubungan	Sudah	Peraturan Bupati
39.	Nomor 54 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan	Sudah	Peraturan Bupati
40.	Nomor 55 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan	Sudah	Peraturan Bupati
41.	Nomor 56 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Transmigrasi	Sudah	Peraturan Bupati
42.	Nomor 57 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sudah	Peraturan Bupati
43.	Nomor 58 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
44.	Nomor 59 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah	Peraturan Bupati
45.	Nomor 60 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sudah	Peraturan Bupati
46.	Nomor 61 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sudah	Peraturan Bupati
47.	Nomor 62 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah	Peraturan Bupati
48.	Nomor 63 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Sudah	Peraturan Bupati
49.	Nomor 64 Tahun 2016	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sudah	Peraturan Bupati
50.	Nomor 65 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sudah	Peraturan Bupati
51.	Nomor 66 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan	Sudah	Peraturan Bupati
52.	Nomor 67 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	Sudah	Peraturan Bupati
53.	Nomor 68 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sudah	Peraturan Bupati
54.	Nomor 69 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan	Sudah	Peraturan Bupati
55.	Nomor 70 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sekretariat Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
56.	Nomor 71 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah	Peraturan Bupati
57.	Nomor 72 Tahun 2016	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sudah	Peraturan Bupati



Quick Win Smart Regency Kutai Kartanegara

A. Implementasi QR-Code

QR-code merupakan singkatan dari Quick Response code. Kode dua dimensi yang berbentuk kotak ini mulai banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengkodekan alamat website, ontact, alamat email, alamat URL/website, nomor telepon atau sekedar teks biasa. Teknologi kode QR diciptakan pada tahun 1994 di Tokyo untuk pertama kalinya oleh tim kecil yang bekerja di Denso Wave yang merupakan salah satu anak perusahaan dari merek mobil Toyota. Perusahaan tersebut menggunakan kode QR agar bisa mempermudah dalam memantau inventori suku cadang. Pemanfaatan QR-Code dapat di implementasikan untuk berbagai macam keperluan, antara lain:

1. Melengkapi model kodefikasi aset kantor.
2. Menggantikan kartu nama berbasis kertas atau plastik yang rentan hilang atau rusak serta mempercepat proses input ke dalam daftar kontak pada smartphone.
3. Melengkapi model kodefikasi pada dokumen-dokumen tertentu atau sebagai untuk proses verifikasi dokumen legal.
4. Marketing sebagai bagian dalam proses promosi barang, dimana QR-Code dapat ditempelkan ke brosur atau barang-barang yang dipromosikan sehingga pengunjung dapat melihat detail atau deskripsi barang dan menyimpannya langsung dari smartphone.

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan : Tenggarong

Pada Tanggal: 26 Oktober 2017

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA,



H. BAMBANG ARWANTO, AP.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19740111 199311 1 002

Implementasi QR-Code untuk berbagai keperluan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, karena tidak diperlukan keahlian khusus, cukup mempelajari kebutuhan kodefikasi di kantor dan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat dan membaca QR-Code. Kemudian di ikuti dengan proses sosialisasi sehingga seluruh pegawai dapat memanfaatkan QR-Code dengan maksimal.

B. Kukar Holiday

Merupakan aplikasi berbasis android yang berisi berbagai info kepariwisataan Kutai Kartanegara, yang bisa digunakan oleh wisatawan jika hendak berwisata di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi ini memuat fitur-fitur antara lain:

1. Kalender event yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
2. Informasi objek-objek wisata
3. Informasi moda transportasi
4. Informasi akomodasi
5. Informasi sarana-sarana publik
6. Push Notification berbasis lokasi
7. Pembelian tiket objek wisata atau wahana hiburan

Melalui aplikasi ini diharapkan wisatawan dapat dimudahkan untuk merencanakan liburan dan melakukan berbagai aktivitas selama berada di Kab Kukar. Untuk Pemkab Kukar kedatangan wisatawan dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat terutama para pelaku usaha di sektor wisata. Aplikasi Kukar Holiday juga dapat menghasilkan keuntungan berupa penjualan tiket objek wisata dan pop-up iklan, sehingga dimungkinkan untuk pihak swasta berinvestasi dalam pengembangan aplikasi ini.

C. Pengembangan Aplikasi SIPULAN

SIPULAN adalah Aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan yang dilakukan secara online di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terintegrasi pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap (SIMARI), termasuk penambahan fitur:

1. pendaftaran online rawat inap
2. evaluasi online pasca rawat inap.

Selain menggunakan aplikasi RSUD A.M Parikesit juga menyediakan saluran pendaftaran online melalui Website, Whatsapp, Telepon dan SMS. Melalui pendaftaran online diharapkan pasien akan mendapatkan kepastian nomor antrian beserta jadwal ketersediaan dokter di poliklinik RS.

D. Website Pertanian

Dinas Pertanian akan mengembangkan Website berisikan informasi-informasi yang dapat digunakan oleh berbagai stakeholder, terutama para petani dan peternak. Melalui pemanfaatan data-data dalam website tersebut, diharapkan petani dan peternak dapat meningkatkan hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kab. Kukar.

Website memuat data-data antara lain :

1. Realisasi penggunaan lahan pertanian
2. Informasi Produksi tanaman (padi, palawija dan hortikultura)
3. Informasi Produksi Peternakan
4. Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian
5. Data Infrastruktur Pendukung
6. Data Curah Hujan
7. Data ALSINTAN

